

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 265 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PASIRJAMBU
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pasirjambu untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pasirjambu untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN PASIRJAMBU

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Pasirjambu merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pasirjambu untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pasirjambu yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Pasirjambu bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Pasirjambu dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Pasirjambu agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Pasirjambu;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pasirjambu;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Pasirjambu.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN PASIRJAMBU

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Pasirjambu dalam menyusun Renja Kecamatan Pasirjambu.

(2) Renstra Kecamatan Pasirjambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pasirjambu paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Pasirjambu; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pasirjambu.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Pasirjambu dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Pasirjambu dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Pasirjambu; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Pasirjambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN PASIRJAMBU

Pasal 5

(1) Kecamatan Pasirjambu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Pasirjambu dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Pasirjambu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Pasirjambu terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Pasirjambu.
(3) Camat Pasirjambu menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Pasirjambu.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN PASIRJAMBU

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Pasirjambu dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Pasirjambu mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Pasirjambu dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Pasirjambu, maka Renstra Kecamatan Pasirjambu dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Pasirjambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Pasirjambu terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Pasirjambu.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 265

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 265 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PASIRJAMBU
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi serta potensi dan sumber daya yang tersedia. Proses ini dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan yang tepat guna menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan di wilayah kecamatan. Melalui perencanaan strategis ini, Kecamatan Pasirjambu berkomitmen membangun visi dengan mengidentifikasi potensi, menetapkan strategi secara spesifik, serta melakukan analisis komprehensif terhadap situasi internal maupun eksternal, termasuk peluang, kecenderungan, dan dampak yang mungkin memengaruhi organisasi.

Penyusunan dokumen ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menginstruksikan kepala daerah beserta perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025–2029. Dalam Inmendagri tersebut ditegaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya, baik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra-PD, yang selanjutnya dioperasionalisasikan melalui perencanaan pembangunan tahunan, yaitu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di Kecamatan Pasirjambu. Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program, kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Pasirjambu. Sesuai dengan karakteristik Kecamatan yang berbaris Pemerintahan Kewilayahan, maka strategi pencapaian Renstra Kecamatan Pasirjambu dirumuskan melalui penguatan fungsi dan kewenangan Kecamatan, yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Pasirjambu yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Bandung.
2. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi Kecamatan Pasirjambu sebagai perangkat daerah yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan strategi pendekatan institusi pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39);
16. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.769- TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.862-TAPEM/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor

137.1/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 adalah untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu selama periode 2025-2029 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan koordinasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Pasirjambu.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menyusun perencanaan strategis jangka menengah yang komperhensif dan terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu pada tahun 2025-2029.
2. Mengidentifikasi potensi, permasalahan dan sumber daya yang ada di Kecamatan Pasirjambu sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Pasirjambu dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan; dan

4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIRJAMBU

Bab II Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pasirjambu paling sedikit memuat:

1. Gambaran Pelayanan Kecamtan Pasirjambu; dan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamtan Pasirjambu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIRJAMBU

Bab III Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamtan Pasirjambu Tahun 2025-2029;
2. Strategi Kecamtan Pasirjambu dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
3. Arah Kebijakan Kecamtan Pasirjambu dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:

1. Uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
2. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamtan Pasirjambu; dan 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

BAB V PENUTUP

Bab V penutup paling sedikit memuat:

1. Kesimpulan;
2. Kaidah pelaksanaan; dan
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIRJAMBU

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pasirjambu

Kecamatan Pasirjambu sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kewilayahan, Kecamatan Pasirjambu bertanggung jawab untuk menjembatani kebijakan pemerintah kabupaten dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Pasirjambu tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga menyentuh bidang sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai standar. Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi, Kecamatan Pasirjambu juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan berbasis digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan dukungan potensi wilayah yang cukup besar serta peran aktif masyarakat, Kecamatan Pasirjambu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima, mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Pasirjambu

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :

a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pembangunan;
6. Seksi Sosial Budaya;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Jabatan Fungsional.

1. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi :

   a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
   b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
   c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   d. Penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan.

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

   a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
   b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
   c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
   d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
   e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

f. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. Penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi keuangan.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

   a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
   b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
   c. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
   d. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
   e. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
   f. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
   g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan;
   h. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
   c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

8. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
   c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   d. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

9. Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya.

   Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

   1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
   2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;

3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

10. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian kegiatan Kecamatan secara professional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pasirjambu sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Kecamatan Pasirjambu



Sumber data : Hasil analisis Kecamatan Pasirjambu, 2025

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pasirjambu

Kecamatan Pasirjambu memiliki sumber daya yang terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin, pangkat / golongan, tingkat Pendidikan, jenis pendidikan yang di ikuti baik Pendidikan formal dan non formal serta penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat di Wilayah Kecamatan Pasirjambu. Berikut ini sumber daya yang dimaksud berdasarkan inventarisasi per Bulan Desember 2024 :

2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Pasirjambu berjumlah 16 orang, terdiri dari 9 (sembilan) orang Pejabat struktural, 5 (lima) orang staf pelaksana, dan 2 (dua) orang tenaga PPPK Selain itu terdapat pula 7 orang tenaga Non PNS. Adapun Susunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Pasirjambu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirjambu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Status Kepegawaian																Jumlah Pegawai			Persentase		
		ASN							Non-ASN														
		PNS/CPNS		PPPK		Jumlah ASN			THL/TA Kecamatan Pasirjambu		THL Disdukcapil		Satpol PP dan Linmas		Jumlah Non-ASN								
		L	P	L	P	L	P	JML	L	P	L	P	L	P	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
[1]	[2]	[3]		[4]		[5 = 3+4]			[6]		[7]		[8]		[9 = 6+7+8]			[10 = 5+9]			[11 = 10 / Σ10]		
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA	1	-	1	-	2	-	2	2	2	1	1	15	1	18	4	22	20	4	24	46,51	9,30	55,81
4	D3	1	1	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4,65	2,33	6,98
5	S1	9	1	-	-	9	2	11	1	2	-	-	-	1	1	3	4	10	5	15	23,26	11,63	34,88
6	S2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2,33	2,33
[x]	Jumlah (Σx)	11	3	2	-	13	3	16	3	5	1	1	15	2	19	8	27	32	11	43	74,42	25,58	100%
[y]	Persentase (Σx / Σ [10])	25,58	6,98	4,65	0,00	30,23	6,98	37,21	6,98	11,63	2,33	2,326	34,88	4,65	44,19	18,60	62,79	74,42	25,58	100,00			

Sumber data Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pasirjambu Bulan Desember 2024

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat/Golongan	ASN		CPNS		PPPK		THL dan TA		Jumlah Pegawai		Jumlah Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pembina Muda Tingkat I, IV / b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pembina , IV/a	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Penata Tingkat I, III/d	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3
4	Penata, III/c	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
5	Penata Muda Tingkat I, III/b	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
6	Pengatur Muda, III/a	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3
7	Pengatur Tingkat I, II/d	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
8	Pengatur, II/c	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
9	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pengatur Muda, II/a	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
11		0	0	0	0	0	0	3	4	3	4	7
	Jumlah	10	3	1	0	2	0	3	4	16	7	23

Sumber data Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pasirjambu Bulan Desember 2024

Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu, komposisi pegawai dibagi habis kedalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana. Komposisi pegawai ASN di Kecamatan Pasirjambu per tanggal 30 Desember 2024, lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Daftar Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pasirjambu
Berdasarkan Jabatan, Pangkat / Golongan

No.	Nama	Jabatan	Jumlah	Pangkat / Golongan
ASN				
1	Nia Kania, S.PT., M.I.L	Camat	1 Orang	Pembina / IVa
2	Hermawan Santoso	Sekretaris Kecamatan	1 Orang	Penata / IIIc
3	Dadan Rusyad Soemardi, S.PT	Kasi Pemerintahan	1 Orang	Penata Tk.I / IIId
4	Agus Priyatman, S.HI	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Orang	Penata Muda Tk.I / IIIb

No.	Nama	Jabatan	Jumlah	Pangkat / Golongan
ASN				
5	Aan Hasanah	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang	Penata Tk.I / IIId
6	Jeni Herdiana, S.Sos	Kasi Pembangunan	1 Orang	Penata Tk.I / IIId
7	Agus Gunarsa Nugra, S.IP	Kasi Sosial dan Budaya	1 Orang	Penata / IIIc
8	Usep Rohmat, S.Ag	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 Orang	Penata / IIIc
9	Ahmad Setiadi	Kasubag Program dan Keuangan	1 Orang	Pengatur Muda / IIIa
10	Siti Julaeha	Pengolah Data dan Informasi	1 Orang	Penata Muda Tk.I / IIIb
11	Alimin, A.Md., S.M	Penelaah Teknis Kebijakan	1 Orang	Penata Muda / IIIa
12	Ayub Sutisna	Penelaah Teknis Kebijakan	1 Orang	Pengatur Tk.I / IId
13	M. Khoeroni Aziz Sudrajat	Pengolah Data dan Informasi	1 Orang	Pengatur Tk.I / IId
CPNS				
14	Andhieca Satria Sujatniko, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1 Orang	Penata Muda / IIIa
PPPK				
15	M. Ali Barkah, A.Md	Jabatan Fungsional Arsiparis	1 Orang	Pengatur, II/c
16	Iman Kardiman	Pengadminitrasi Perkantoran	1 Orang	Pengatur Muda, II/a

Sumber data Kasubag Umum dan Kepegawaian Bulan Desember 2024

Tabel 2.4 Daftar Tenaga Non ASN Kecamatan Pasirjambu

No.	Nama	Jabatan	Jumlah	Pendidikan
1	Rina Nurkamelia	Pengelola Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan	1 Orang	S1
2	Eki Yusuf	Operator Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan / Penata Laporan Keuangan	1 Orang	SMA
3	Silviawati	Pengelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	1 Orang	SMA
4	Tantri Lestari	Pengelola Layanan Operasional	1 Orang	S1
5	Ruri Indra Lestari	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1 Orang	SMA
6	Andi	Tenaga Sukwan	1 Orang	SMA
7	Seftian Ali	Tenaga Ahli Media Sosial	1 Orang	S1

Sumber data Kasubag Umum dan Kepegawaian Bulan Desember 2024

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pasirjambu Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS/PPPK		
1	Gol IIA	0	1	1	6%
2	Gol IIC	1	0	1	6%
3	Gol IID	2	0	2	13%
4	Gol IIIA	2	1	3	19%
5	Gol IIIB	2	0	2	13%

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS/PPPK		
6	Gol IIIC	3	0	3	19%
7	Gol IIID	3	0	3	19%
8	Gol IVA	1	0	1	6%
	Jumlah	14	2	16	100%

Sumber data Kasubag Umum dan Kepegawaian Bulan Desember 2024

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pasirjambu yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon

No.	Esselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklatpim	Jumlah Pegawai yang Mengikuti	%
1.	III a	1 Orang	III	1 Orang	11,11%
2.	III b	1 Orang	III	1 Orang	11,11%
3.	IV a	5 Orang	IV	5 Orang	55,56%
4.	IV b	2 Orang	IV	2 Orang	22,22%
	Jumlah	9 Orang		9 Orang	100,00%

Sumber data Kasubag Umum dan Kepegawaian Bulan Desember 2024

Gambar 2.2 Peta Jabatan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024

PETA JABATAN				KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN
	CAMAT			1	1
KECAMATAN PASIRJAMBU		Sekretaris Kecamatan		1	1
	SEKRETARIAT	Sub Bagian Keuangan Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1
			Bendahara	1	1
			Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1
			Penata Laporan Keuangan	1	0
			Pengolah Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan	1	0
			Pengolah Data dan Informasi	1	0
			Jumlah [1]	7	4
		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1
			Pengelola Pemanfaat Barang Milik Daerah	1	1
			Pengelola Dokumentasi	1	1
			Pengelola Kepegawaian	1	0
			Pengelola Layanan Operasional	1	0
			Pengadministrasi Umum Perkantoran	1	0
			Jumlah [2]	6	3
			Jumlah [1+2]	13	7
			Kepala Seksi Pemerintahan	1	1
	SEKSI PEMERINTAHAN		Pengelola Bantuan Keuangan Desa	1	0
			Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	0
			Pengelola PBB P2 dan BPHTB	1	1
			Pengolah Data dan Informasi	1	0
			Pengadministrasi Perkantoran	1	0
			Jumlah	6	2
			Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1
	SEKSI PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	1	1
			Pengolah Data dan Informasi	1	0
				3	2
			Kepala Seksi Sosial Dan Budaya	1	1
	SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA		Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	1
			Pengelola Fasilitasi Sosial dan Umum	1	0
			Pengolah Data dan Informasi	1	0
			Jumlah	4	2
			Kepala Seksi Pembangunan	1	1
	SEKSI PEMBANGUNAN		Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	1	1
			Pengolah Data dan Informasi	1	0
			Jumlah	3	2
			Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1
	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Penatakelola Keamanan dan Ketertiban	1	0
			Operator Layanan Operasional (Petugas Keamanan)	1	0
			Jumlah	3	1
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		Arsiparis	1	0
			Pranata Komputer	1	0
			Jumlah	2	0
JUMLAH SELURUHNYA: 16 PEGAWAI					
Jumlah Kebutuhan Pegawai				34	
Jumlah Ketersediaan Pegawai				16	
Jumlah Kekurangan Pegawai				18	
Persentase Ketersediaan Pegawai				47,06%	
Persentase Kekurangan Pegawai				52,94%	

Sumber data Kasubag Umum dan Kepegawaian Bulan Desember 2024

Dari gambar 2.2 diatas dapat dilihat bahwa perlu adanya penambahan pegawai terutama pada level pengelola / pelaksana golongan II dan operator. Kecamatan Pasirjambu telah berupaya setiap tahun mengusulkan penambahan personil dan mengusulkan analisa beban kerja, namun terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Sebagai solusi jangka pendek untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pasirjambu melakukan optimalisasi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan tambahan tenaga non-ASN.

2.1.2.2 Sumber Daya Aset / BMD

Dalam penyelenggaraan peningkatan pelayanan publik sangat diperlukan atas ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan kewajibanya sebagai peneyelenggara pelayanan publik. Adapun dukungan sarana dan prasarana perangkat daerah terakumulasi dalam penetapan laporan penggunaan Barang Milik Daerah pada satuan perangkat daerah yang dijelaskan pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.7 Data Hasil Rekonsiliasi Aset
Periode 01 Januari s/d 30 Desember 2024

No.	Jenis Aset	Saldo Akhir Per 30 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan s/d 30 Desember 2024	Nilai Buku Per 30 Desember 2024
1	Tanah	72.000.000	0	72.000.000
2	Peralatan dan Mesin	1.349.937.438	1.192.769.418	157.168.020
3	Gedung dan Bangunan	2.167.134.583	461.447.747	1.705.686.836
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
	Total Aset Tetap	3.589.072.021	1.654.217.165	1.934.854.856
7	Aset Tak Berwujud	0	0	0
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	263.918.089	0	263.918.089
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	0	0	0
	Total Aset Lainnya	263.918.089	0	263.918.089
Total Aset Tetap + Aset Lainnya		3.852.990.110	1.654.217.165	2.198.772.945

Sumber data Pengelola Pemanfaatan BMD, Desember 2024

Sedangkan persentase sarana dan prasarana dengan pengelompokan kondisi aset, selengkapnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Data Klasifikasi Aset Berdasarkan Kondisi

No.	Klasifikasi Kondisi Aset	Nilai Aset	Persentase
1	Baik	3.589.072.021	93,15%
2	Kurang Baik	0	0%
3	Rusak Berat	263.918.089	6,85%
JUMLAH		3.852.990.110	100%

Sumber data Pengelola Pemanfaatan BMD, Desember 2024

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan guna memperbaiki / mengganti sarana dan prasarana yang sudah Rusak Berat / tidak lagi berfungsi secara optimal serta perlu dianggarkan secara rutin. Adapun pemeliharaan BMD yang rutin dilakukan setiap tahun direncanakan dan dilaksanakan sesuai skala prioritas pemeliharaan yang direncanakan.

2.1.2.3 Potensi Kecamatan Pasirjambu

Setelah menguraikan mengenai sumber daya dan aset yang dimiliki, penting untuk melihat potensi yang ada di Kecamatan Pasirjambu sebagai peluang pengembangan wilayah di masa mendatang. Potensi ini mencakup berbagai aspek strategis yang dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan, baik dari sisi geografis, sumber daya alam, ekonomi, pariwisata, infrastruktur, maupun sosial budaya.

1. Potensi Geografis dan Lokasi

   Kecamatan Pasirjambu terletak di kawasan selatan Kabupaten Bandung dengan kondisi topografi yang didominasi dataran tinggi dan perbukitan. Wilayah ini berada pada ketinggian antara 1.200–1.800 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara yang relatif sejuk berkisar antara 18–24 °C. Kondisi geografis ini menjadikan Pasirjambu sebagai daerah yang strategis untuk pengembangan pertanian, perkebunan, serta pariwisata. Selain itu, letak wilayah yang berbatasan dengan jalur utama menuju destinasi wisata di Ciwidey dan Rancabali menjadikan Pasirjambu memiliki posisi penting dalam mendukung sektor perdagangan dan jasa.

2. Potensi Sumber Daya Alam

   Pasirjambu dikenal memiliki tanah yang subur dengan curah hujan tinggi sehingga sangat mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan. Komoditas unggulan di bidang hortikultura meliputi sayuran (kentang, kol, wortel, cabai), buah-buahan (stroberi, alpukat, pisang), serta tanaman perkebunan seperti teh dan kopi. Dengan ketersediaan lahan pertanian yang luas dan kondisi iklim yang sesuai, sektor ini dapat menjadi basis utama penguatan ekonomi masyarakat.

3. Potensi Ekonomi dan UMKM

   Kegiatan ekonomi masyarakat Pasirjambu sebagian besar masih berbasis pertanian, namun telah berkembang pula berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produk-produk olahan hasil pertanian seperti keripik sayuran, olahan kopi, dodol, bandrek, serta berbagai makanan khas lokal menjadi penopang perekonomian masyarakat. Selain itu, potensi kerajinan tangan seperti anyaman bambu dan batik lokal dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Aset ini menjadi modal penting bagi fasilitasi UMKM seperti halnya kita bisa memanfaatkan halaman kantor untuk d jadikan tempat bazar UMKM pada saat acara-acara besar ataupun acara kantor, dan untuk sektor perkebunan mungkin kita bisa memanfaatkan halaman belakang kecamatan untuk dijadikan lahan berkebun skala kecil

4. Potensi Pariwisata

   Wilayah Pasirjambu memiliki daya tarik wisata yang cukup besar, baik berupa wisata alam, wisata edukasi, maupun wisata budaya. Keindahan perkebunan teh, panorama pegunungan, serta lokasi wisata seperti Situ Patenggang dan kawasan agrowisata stroberi menjadi magnet wisatawan. Selain itu, potensi wisata budaya berupa seni tradisional dan upacara adat lokal masih terjaga dan dapat dikembangkan sebagai daya tarik khas daerah. Wisata buatan seperti pemandian air panas,

glamping, dan wahana rekreasi keluarga juga terus berkembang mengikuti tren kebutuhan wisata masyarakat.

5. Potensi Infrastruktur

   Infrastruktur dasar di Kecamatan Pasirjambu sudah cukup mendukung mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, dan akses menuju pusat-pusat kegiatan. Jalan utama yang menghubungkan Bandung dengan kawasan wisata Ciwidey–Rancabali melalui Pasirjambu menjadikan wilayah ini strategis untuk transportasi barang dan jasa. Selain itu, ketersediaan pasar tradisional, jaringan listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar di berbagai desa menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Potensi Sosial dan Budaya

   Masyarakat Pasirjambu memiliki karakter sosial yang kuat dengan budaya gotong royong, solidaritas, dan kearifan lokal yang masih terjaga. Kesenian tradisional, upacara adat, serta aktivitas budaya lainnya menjadi identitas khas yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya. Selain itu, dengan jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar, Pasirjambu memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Pasirjambu

Kinerja penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Pasirjambu pada dasarnya mencerminkan upaya pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menjembatani pelayanan antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.

Dalam praktiknya, pelayanan yang diberikan Kecamatan Pasirjambu mencakup pelayanan administrasi kependudukan,

perizinan, pelayanan umum, koordinasi pembangunan wilayah, serta fasilitasi kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi, penyelenggaraan pelayanan sudah berjalan cukup baik, ditandai dengan tersedianya sarana prasarana, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, serta penggunaan sistem informasi untuk mempercepat proses pelayanan.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Pasirjambu

Kecamatan Pasirjambu merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bandung yang memiliki karakter geografis berupa dataran tinggi dengan kondisi alam yang sebagian besar didominasi oleh perkebunan, lahan pertanian, dan kawasan perdesaan. Secara administratif, Kecamatan Pasirjambu membawahi sejumlah desa yang tersebar dengan kondisi topografi bervariasi, sehingga memberikan tantangan sekaligus peluang dalam perencanaan pembangunan serta pelayanan publik, Kecamatan Pasirjambu terletak di wilayah selatan Kabupaten Bandung dengan kondisi geografis berupa dataran tinggi.

Ketinggian wilayah Kecamatan Pasirjambu, berada di ketinggian antara 500 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut (mdpl), Kecamatan Pasirjambu sendiri berada di zona dataran tinggi, di sekitar kaki Gunung Patuha dengan puncak mencapai 2.334 mdpl, dan lereng dengan kemiringan antara 8–15% hingga di atas 45%, Curah hujan rata-rata di Kecamatan Pasirjambu diklaim berada di kisaran 1.500 hingga 4.000 mm per tahun, dengan suhu udara berkisar antara 10°C hingga 24°C, tergantung lokasi (terutama diketinggian) dan musim. Rata-rata suhu tahunan berkisar antara 16°C–25°C, dengan jarang turun di bawah 14°C atau naik di atas 27°C.

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Soreang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Cianjur
- Sebelah Timur : Kecamatan Soreang / Pangalengan
- Sebelah Barat : Kecamatan Ciwidey / Rancabali

Perkembangan Jumlah penduduk Kecamatan Pasirjambu pada awal Tahun 2022, sebanyak : 94.788 Orang, yang terdiri dari :

- Laki –laki : 47.935 Orang
- Perempuan : 46.853 Orang
- Jumlah KK : 27.426 KK
- Kepadatan Penduduk : 1 / 3.956 Km / Jiwa

Dari data awal tersebu diatas dapat diproyeksikan jumlah penduduk untuk 5 Tahun kedepan sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.9 Proyeksi Penduduk Kecamatan Pasirjambu 5 Tahun kedepan

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Keterangan
2022	94.788	Data dasar
2023	95.736	Proyeksi
2024	96.694	Proyeksi
2025	97.661	Proyeksi
2026	98.638	Proyeksi

Sumber data : Hasil Analisi Kecamatan Pasirjambu, 2025

Dalam empat tahun, jumlah penduduk Kecamatan Pasirjambu diproyeksikan bertambah sekitar 3.850 jiwa.

Pada tahun 2024, Kecamatan Pasirjambu melaksanakan berbagai urusan pelayanan masyarakat. Bidang administrasi kependudukan mencakup pelayanan KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Pada perizinan dan rekomendasi, diberikan layanan rekomendasi usaha kecil dan izin keramaian. Dalam koordinasi pembangunan wilayah, kecamatan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Untuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, dilakukan fasilitasi Linmas serta koordinasi dengan Polsek dan Koramil. Bidang pemberdayaan masyarakat desa diwujudkan melalui

pendampingan program ekonomi. Sementara itu, dalam pelayanan sosial dan kemasyarakatan, kecamatan memfasilitasi bantuan sosial dan kegiatan keagamaan. Adapun pada urusan pengelolaan sarana dan prasarana wilayah, dilaksanakan pemeliharaan kantor kecamatan dan aset umum.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan bagian krusial dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan. Kecamatan Pasirjambu, sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Bandung melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Pelimpahan kewenangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung nomor 76 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Rincian sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat dituangkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimphaan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, adapun Rincian Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Daerah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.9 Rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Pendidikan	1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan
		2. Monitoring dan fasilitasi kelayakan saranadan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan
2.	Kesehatan	3. Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan
		4. Monitoring dan fasilitasi kelayakan saranadan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
		prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan
3.	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5. Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	Sosial	6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7. Penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan
		8. Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6.	Pertanahan	9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
7.	Lingkungan Hidup	10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
		12. Fasilitasipembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
		13. Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14. Monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil
9.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15. Pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan, Pergantian Antar Waktu dan Penjabat Kepala Desa
10.	Komunikasi Dan Informatika	16. Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
11.	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	17. Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
		18. Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
12.	Penanaman Modal	19. Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
		20. Monitoring kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
13.	Kepemudaan Dan Olahraga	21. Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
		22. Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
14.	Kebudayaan	23. Pemajuan seni dan budaya tingkat Kecamatan
		24. Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
15.	Pariwisata	25. Pengembangan potensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
		26. Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
		27. Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala Kecamatan
16.	Pertanian	28. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
		prasarana pertanian

Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023

Seluruh kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati Bandung kepada Camat sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Pasirjambu. Evaluasi keberhasilan tugas kewenangan dilakukan dengan cara membandingkan antara Program Kerja yang dibuat di awal tahun dengan realisasi pelaksanaan tugas di akhir tahun.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur dalam menilai sejauh mana pelaksanaan tugas Kecamatan Pasirjambu berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada periode 2021–2024 memberikan gambaran mengenai efektivitas program, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan, terutama pada aspek pelayanan administrasi kependudukan dan koordinasi pembangunan wilayah. Namun, terdapat fluktuasi pada indikator kepuasan masyarakat dan ketepatan waktu pelayanan, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 pada awal periode, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Berikut disajikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan IKU dan IKK Kecamatan Pasirjambu :

Tabel 2.10 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021-2026

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PASIRJAMBU TAHUN 2021-2026														
					TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
					TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja, aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik (Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	67,77	67,80	100,04%	68,45	73,80	107,82%	69,00	80,40	116,52%	69,50		0,00%	70,00		0,00%
				Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	98,50	98,20	99,70%	98,50	86,53	87,85%	98,50	99,96	101,48%	98,50		0,00%	98,50		0,00%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). *(IKU)	84,00	85,77	102,11%	85,00	90,44	106,40%	86,00	91,42	106,30%	87,00		0,00%	88,00		0,00%
			Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%	2	3	N/A	4		N/A	4		0,00%

Sumber data : Hasil analisis Kecamatan Pasirjambu, 2025

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, kemudian adanya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, terdapat perubahan pada indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dimana sebelumnya Persentase Desa Beradministrasi Baik menjadi Jumlah Desa Cepat Berkembang.

Secara umum, indikator yang ditetapkan selama periode tersebut telah menunjukkan capaian tinggi, bahkan konsisten mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021-2026. Terutama pada indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasirjambu yaitu Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang setiap tahunnya konsisten mengalami peningkatan. Adapun IKU Jumlah Desa Cepat Berkembang belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan baru dilaksanakan pada tahun 2024. Berikut tingkat capaian kinerja program penunjang dan kewilayahan sebagaimana yang terdapat pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021-2026.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Pasirjambu Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Subkegiatan

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021–2026 diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, memperkuat kapasitas pemerintahan kecamatan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar target program telah tercapai dengan baik, terutama pada aspek pelayanan administrasi kependudukan dan koordinasi pembangunan wilayah. Namun, beberapa kegiatan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana prasarana, serta kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur.

Berikut disajikan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Pasirjambu berdasarkan Renstra Tahun 2021–2026:

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	1. NILAI AKIP 2. PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK				67,77 98,50	68,45 98,50	69,00 98,50	69,50 98,50	70,00 98,50	67,80 98,20	73,80 86,53	69,00 98,50			19,7% 20%	21,5% 17,6%	0% 0%	0% 0%	0% 0%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				67,77	68,45	69,00	69,50	70,00	67,80	73,80	80,40			19,7%	21,5%	23%	0%	0%
1.1	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0		20%	20%	20%	0%	0%
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6		0	6	6	6	6	0	3	6	5		0%	12,5%	28,6%	23,9%	0%
1.1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3		0	3	3	3	3	0	3	3	0		0%	25%	25%	0%	0%
1.1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4		0	4	4	4	4	0	4	4	0		0%	25%	25%	0%	0%
1.1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2		0	2	2	2	2	0	0	2	2		0%	0%	33,4%	33,4%	0%
1.1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		3		0	3	3	3	3	0	2	3	0		0%	16,7%	27,3%	0%	0%
1.1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3		3	3	3	3	3	3	3	3	0		20%	20%	20%	0%	0%
1.1.8	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		0		0	0	1	1	1	0	0	1	0		0%	0%	33,4%	33,4%	0%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.9	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		0		0	0	1	1	1	0	0	1	0		0%	0%	33,4%	33,4%	0%
1.2	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0		20%	20%	20%	0%	0%
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12		12	12	12	12	12	12	10	12	5		20%	16,7%	20,7%	8,7%	0%
1.2.2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2		2	2	2	2	2	2	0	2	2		20%	0%	25%	25%	0%
1.2.3	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD		4		4	4	4	4	4	4	2	4	0		20%	10%	22,3%	0%	0%
1.2.4	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		4		4	4	4	4	4	4	4	4	0		20%	20%	20%	0%	0%
	Persentase BMD dalam Kondisi Baik				98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,20	93,15	99,96	0		20%	19%	20,6%	0%	0%
1.3	Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%		0	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	0		0%	25%	25%	0%	0%
1.3.1	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1		0	1	1	1	1	0	1	1	1		0%	25%	25%	25%	0%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				67,77	68,45	69,00	69,50	70,00	67,80	73,80	80,40	0		19,7%	21,5%	23%	0%	0%
1.4	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu		100%		0	0	100%	100%	100%	0	0	100%	0		0%	0%	33,4%	0%	0%
1.4.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	0%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.4.2	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3		0	0	3	3	3	0	0	3	2		0%	0%	33,4%	22,3%	0%
1.4.3	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0		0	0	40	0	0	0	0	40	0		0%	0%	100%	0%	0%
1.4.4	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0		0	0	100	0	0	0	0	100	0		0%	0%	100%	0%	0%
1.5	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0		20%	20%	20%	0%	0%
1.5.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12		12	12	12	12	12	12	10	12	5		20%	16,7%	20,7%	8,7%	0%
1.5.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6		6	6	6	6	6	6	6	6	3		20%	20%	20%	10%	0%
1.5.3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10		10	10	10	10	10	10	10	10	6		20%	20%	20%	12%	0%
1.5.4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		20		20	20	20	20	20	20	15	20	8		20%	15%	21,1%	8,5%	0%
1.5.5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12		12	12	12	12	12	12	10	12	6		20%	16,7%	20,7%	10,4%	0%
1.5.6	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	0%
1.5.7	Jumlah Snack				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	0%
1.5.6	Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		400		400	400	400	400	400	400	300	400	0		20%	15%	21,1%	0%	0%
	Persentase BMD dalam Kondisi Baik				98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,20	93,15	99,96	0		20%	19%	20,6%	0%	0%
1.6	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		98,50		98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	0		20%	20%	20%	0%	0%
1.6.1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		20%	20%	20%	20%	0%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				67,77	68,45	69,00	69,50	70,00	67,80	73,80	80,40	0		19,7%	21,5%	23%	0%	0%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.7	Persentase Laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0		20%	20%	20%	0%	0%
1.7.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	0%
1.7.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0		12	12	12	12	12	12	10	12	10		20%	16,7%	20,7%	17,3%	0%
1.7.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12		12	12	12	12	12	12	10	12	6		20%	16,7%	20,7%	10,4%	0%
	Persentase BMD dalam Kondisi Baik				98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,20	93,15	99,96	0		20%	19%	20,6%	0%	0%
1.8	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		98,50		98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,20	86,53	98,50	0		20%	17,6%	20,6%	0%	0%
1.8.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7		5	5	7	7	7	5	5	7	5		16,2%	16,2%	22,6%	16,2%	0%
1.8.2	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5		5	5	5	5	5	5	4	5	3		20%	16%	20,9%	12,5%	0%
1.8.3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2		20%	20%	20%	20%	0%
1.8.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		0		2	0	0	0	0	2	0	0	0		100%	0%	0%	0%	0%
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	85,77	90,87	91,70	0		20%	21,1%	21%	0%	0%
2	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		88		84	85	86	87	88	85,77	90,44	86	0		20%	21%	19,7%	0%	0%
2.1	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		100%		0	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	0		0%	25%	25%	0%	0%
2.1.1	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam		1		0	1	1	1	1	0	1	1	0		0%	25%	25%	0%	0%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
2.2	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0		20%	20%	20%	0%	0%
2.2.1	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		1		1	0	1	1	1	1	-	1	0		25%	0%	25%	0%	0%
2.2.2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3		3	0	3	3	3	3	3	3	2		20%	20%	20%	13,4%	0%
	Persentase Desa Beradministrasi Baik				65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	72,50	72,50	75,10	0		22%	21,5%	21,8%	0%	0%
3	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0		20%	20%	20%	0%	0%
3.1	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0		20%	20%	20%	0%	0%
3.1.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		50		0	50	50	50	50	0	50	50	0		0%	25%	25%	0%	0%
3.1.2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		20%	20%	20%	20%	0%
3.2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi		100%		-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	0		0%	25%	25%	0%	0%
3.2.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100		0	100	100	100	100	0	100	100	0		0%	25%	25%	0%	0%
3.2.2	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		1		0	1	1	1	1	0	1	1	0		0%	25%	25%	0%	0%
3.2.3	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemanpaatan Teknologi Tepat Guna		0		0	0	1	1	0	0	0	1	1		0%	0%	50%	50%	0%
3.3	Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		0		0	0	100%	100%	100%	0	0	100%	0		0%	0%	33,4%	0%	0%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3.3.1	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		0		0	0	10	10	10	0	0	10	0		0%	0%	33,4%	0%	0%
3.3.2	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat				0	0	10	10	10	0	0	10	0		0%	0%	33,4%	0%	0%
3.3.3	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PeningkatanKetahanan Pangan Keluarga		0		0	0	10	10	10	0	0	10	0		0%	0%	33,4%	0%	0%
3.3.4	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		0		0	0	10	10	10	0	0	10	0		0%	0%	33,4%	0%	0%
3.3.5	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		0		0	0	10	10	10	0	0	10	0		0%	0%	33,4%	0%	0%
3.3.6	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing		0		0	0	10	10	10	0	0	10	0		0%	0%	33,4%	0%	0%
3.3.7	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan		0		0	0	10	10	10	0	0	10	0		0%	0%	33,4%	0%	0%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
3.3.8	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0		0	0	10	10	10	0	0	10	10		0%	0%	33,4%	33,4%	0%
3.3.9	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0		0	0	10	10	10	0	0	10	0		0%	0%	33,4%	0%	0%
3.3.10	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam		0		0	0	10	10	10	0	0	10	0		0%	0%	33,4%	33,4%	0%
3.3.11	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		0		0	0	10	10	10	0	0	10	0		0%	0%	33,4%	0%	0%
3.3.12	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas		0		0	0	10	10	10	0	0	10	0		0%	0%	33,4%	0%	0%
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		0		84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	85,77	90,87	91,70	0		20%	21,1%	21%	0%	0%
4	PERSENTASE PENEGAKAN PERDA YANG BERKAITAN DENGAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%		1000%	100%	100%	100%	100%	1000%	100%	100%	0		71,5%	7,2%	7,2%	0%	0%
4.1	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-		-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	0		0%	50%	50%	0%	0%
4.1.1	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional		0		0	1	1	1	0	0	1	1	1		0%	33,4%	33,4%	33,4%	0%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
4.1.2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0		0	1	1	1	0	0	1	1	1		0%	33,4%	33,4%	33,4%	0%
4.2	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0		20%	20%	20%	0%	0%
4.2.1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		3		3	3	3	3	3	3	0	3	0		20%	0%	25%	0%	0%
5	PERSENTASE CAPAIAN KEBERHASILAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITUGASKAN KEPALA DAERAH		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0		20%	20%	20%	0%	0%
5.1	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0		20%	20%	20%	0%	0%
5.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0		0	60	50	50	0	0	60	50	50		0%	37,5%	31,3%	31,3%	0%
5.1.2	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		100		100	0	150	100	100	100	0	150	50		22,3%	0%	33,4%	11,2%	0%
5.1.3	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		100		0	150	150	100	100	0	150	150	60		0%	30%	30%	12%	0%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.1.4	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0		0	1	1	0	0	0	1	1	0		0%	50%	50%	0%	0%
5.1.5	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1		0	1	1	1	1	0	1	1	0		0%	25%	25%	0%	0%
	Persentase Desa Beradministrasi Baik				65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	72,50	72,50	75,10	0		22%	21,5%	21,8%	0%	0%
6	PERSENTASE DESA YANG DIBINA DAN DIAWASI		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0		20%	20%	20%	0%	0%
6.1	Persentase Desa yang Dibina		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0		20%	20%	20%	0%	0%
6.1.1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		0		0	10	10	10	0	0	0	10	10		0%	0%	50%	50%	0%
6.1.2	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		10		10	10	10	10	10	10	5	10	0		20%	10%	22,3%	0%	0%
6.1.3	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		0		0	1	0	8	0	0	1	0	0		0%	11,2%	0%	0%	0%
6.1.4	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		10		10	10	10	10	10	10	10	10	10		20%	20%	20%	20%	0%

Sumber data : Hasil Analisi Kecamatan Pasirjambu, 2025

Berdasarkan Data yang disajikan pada Tabel 2.12 merupakan tabulasi data yang menampilkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasirjambu mulai dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Dari tabel tersebut menyajikan informasi bahwa rata-rata Rasio capaian komulatif sampai dengan Bulan Desember 2022 sebesar 98,75%, angka tersebut diperoleh dengan cara melakukan rata-rata nilai Rasio Capaian, berikut disajikan cara menghitungnya :

$$= \left(\frac{\text{RC Keg-1 + RC Keg-2 + RC Keg-3 + RC Keg-4 + } \quad \text{+ RC Keg-N}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \right)$$

$$= \left(\frac{\text{100,00\% + 100,00\% + 100,00\% + 100,00\% + } \quad \text{+ Dst}}{\text{51 Kegiatan}} \right)$$

$$= \left(\frac{\text{5036\%}}{\text{51 Kegiatan}} \right)$$

$$= 98{,}75\%$$

Keterangan :

RC Keg-1 : Rasio Capaian pada Kegiatan ke 1
RC Keg-2 : Rasio Capaian pada Kegiatan ke 2
RC Keg-3 : Rasio Capaian pada Kegiatan ke 3
RC Keg-4 : Rasio Capaian pada Kegiatan ke 4
RC Keg-N : Rasio Capaian pada Kegiatan ke N

Dengan cara yang sama dapat dihitung rata-rata rasio capaian komulatif pada Tahun 2022 sampai dengan 2026. Berikut disajikan *trend* data secara lengkap pada pada gambar dibawah ini :

Dengan cara yang sama dapat dihitung rata-rata rasio capaian komulatif pada Tahun 2022 sampai dengan 2026. Berikut disajikan *trend* data

Tabel 2.12 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pasirjambu

Uraian Sesuai Kewenangan Kepala Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. Nilai AKIP 2. Persentase BMD Dalam Kondisi Baik																	
KECAMATAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.545.310.000	5.073.958.600	4.245.223.600	4.005.366.968	4.010.366.968	4.545.310.000	4.253.108.480	4.005.366.968	1.945.358.541	-	20,8 %	19,5 %	19,1 %	9,4%	0%	- 133.735.758	-0,052
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	52.000.000	30.000.000	12.000.000	12.000.000	2.000.000	18.354.000	12.000.000	-	-	1,9%	17%	16,2 %	0%	0%	2.500.000	- 0,00475
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6.130.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-	2.230.000	2.000.000	1.190.000	-	0%	14,8 %	17,9 %	14,5 %	0%	500.000	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	9.540.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-	2.700.000	2.000.000	-	-	0%	14,6 %	17,1 %	0%	0%	500.000	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	10.030.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-	2.280.000	2.000.000	-	-	0%	12%	17,8 %	0%	0%	500.000	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	9.590.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	-	3.700.000	2.000.000	2.380.000	-	0%	20%	15,8 %	24,6 %	0%	500.000	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	6.030.000	4.999.000	1.999.000	1.999.000	-	1.900.000	1.999.000	-	-	0%	12,7 %	18,4 %	0%	0%	499.750	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	10.680.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.544.000	2.000.000	-	-	9,3%	25,6 %	12,1 %	0%	0%	-	- 0,02325
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			500	500	500			500									
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			500	500	500			500									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.108.405.000	4.549.509.400	3.594.103.600	3.606.746.968	3.606.746.968	4.108.405.000	3.750.017.777	3.606.746.968	1.774.817.622	-	21,2 %	19,3 %	19,4 %	9,6%	0%	-125.414.508	-0,053
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.093.905.000	4.535.009.400	3.579.603.600	3.592.246.968	3.592.246.968	4.093.905.000	3.736.555.274	3.592.246.968	1.772.165.622	-	21,2 %	19,3 %	19,4 %	9,6%	0%	- 125.414.508	-0,053
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.913.400	5.000.000	2.652.000	-	20%	19,7 %	20,1 %	10,7 %	0%	-	-0,05

Uraian Sesuai Kewenangan Kepala Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	5.000.000	4.345.803	4.500.000	-	-	20,9%	18,2%	19,3%	0%	0%	- 125.000	-0,05225
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.203.300	5.000.000	-	-	19,2%	17,9%	21,6%	0%	0%	125.000	-0,048
Persentase BMD dalam Kondisi Baik																	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	2.235.000	5.000.000	525.000	-	0%	7,5%	29,1%	3,1%	0%	1.250.000	-6,939E-18
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	2.235.000	5.000.000	525.000	-	0%	7,5%	29,1%	3,1%	0%	1.250.000	-6,939E-18
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	525.000,00	-	0%	0%	8,4%	3,5%	0%	1.250.000	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	525.000	-	0%	0%	33,4%	3,5%	0%	1.250.000	-6,939E-18
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%			-	#VALUE!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%			-	#VALUE!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.000.000	142.654.100	140.000.000	118.000.000	118.000.000	118.000.000	137.408.375	118.000.000	26.557.900	-	18,6%	21,6%	18,7%	4,4%	0%	-	-0,0465
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	11.997.605	12.000.000	2.829.600	-	20%	20%	20,1%	4,8%	0%	-	-0,05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	76.500.000	72.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	79.932.263	60.000.000	4.190.300	-	18,3%	24,4%	18,1%	1,4%	0%	-	-0,04575
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	7.803.900	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.800.000	5.000.000	4.657.500	-	18%	28,1%	18%	16,8%	0%	-	-0,045
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	16.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	16.000.000	15.000.000	7.775.000	-	18,6%	19,8%	18,6%	10,3%	0%	-	-0,0465
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000	8.150.200	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	8.078.507	6.000.000	925.500	-	18,7%	25,2%	18,8%	2,9%	0%	-	-0,04675

Uraian Sesuai Kewenangan Kepala Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	22.200.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	13.600.000	20.000.000	6.180.000	-	18,7 %	12,7 %	20,3 %	6,7%	0%	-	-0,04675
Persentase BMD dalam Kondisi Baik																	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	10.000.000	45.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	23.330.300	10.000.000	9.900.000	-	11,8 %	27,4 %	10,2 %	15,7 %	0%	-	-0,0295
Pengadaan Mebel	10.000.000	10.000.000	45.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	23.330.300	10.000.000	9.900.000	-	11,8 %	27,4 %	10,2 %	15,7 %	0%	-	-0,0295
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.405.000	232.295.100	305.920.000	211.120.000	211.120.000	223.405.000	254.659.600	211.120.000	111.244.019	-	18,9 %	21,6 %	17,6 %	10,1 %	0%	- 3.071.250	-0,04725
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	32.375.100	32.000.000	13.000.000	13.000.000	12.000.000	27.204.200	13.000.000	7.344.019	-	11,8 %	26,6 %	13,4 %	9,4%	0%	250.000	-0,0295
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.405.000	199.920.000	273.920.000	198.120.000	198.120.000	211.405.000	227.455.400	198.120.000	103.900.000	-	19,6 %	21,1 %	17,9 %	10,1 %	0%	- 3.321.250	-0,049
Persentase BMD dalam Kondisi Baik																	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.500.000	72.500.000	75.000.000	37.500.000	42.500.000	83.500.000	67.103.428	37.500.000	22.314.000	-	26,9 %	21,6 %	12,3 %	8,4%	0%	- 10.250.000	-0,06725
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	15.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	12.800.000	15.000.000	4.840.000	-	18,8 %	16%	19,3 %	6,7%	0%	-	-0,047
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.500.000	10.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.100.000	7.500.000	2.480.000	-	18,8 %	17,8 %	19%	6,7%	0%	-	-0,047
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	45.000.000	15.000.000	20.000.000	50.000.000	47.203.428	15.000.000	14.994.000	-	27,8 %	26,3 %	8,5%	10,2 %	0%	- 7.500.000	-0,0695
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	- 2.750.000	-0,25
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.664.000	72.567.700	217.164.000	179.664.000	179.664.000	39.664.000	93.520.731	179.664.000	41.608.000	-	5,8%	13,6 %	25,4 %	6,2%	0%	35.000.000	-0,0145

Uraian Sesuai Kewenangan Kepala Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	19.664.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	9.950.000	25.000.000	-	-	0%	10,6 %	29,5 %	0%	0%	6.250.000	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	19.664.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	9.950.000	25.000.000	-	-	0%	10,6 %	29,5 %	0%	0%	6.250.000	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	39.664.000	52.903.700	192.164.000	154.664.000	154.664.000	39.664.000	83.570.731	154.664.000	41.608.000	-	6,7%	14,1 %	24,8 %	7,1%	0%	28.750.000	-0,01675
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan PerizinanNon Usaha	9.664.000	-	4.990.000	4.664.000	4.664.000	9.664.000	-	4.664.000	-	-	40,3 %	0%	19,5 %	0%	0%	- 1.250.000	-0,10075
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30.000.000	52.903.700	187.174.000	150.000.000	150.000.000	30.000.000	83.570.731	150.000.000	41.608.000	-	5,3%	14,7 %	25%	7,4%	0%	30.000.000	-0,01325
Persentase Desa Beradministrasi Baik																	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000	57.293.800	176.496.900	160.000.000	160.000.000	15.000.000	34.144.800	160.000.000	33.050.000	-	2,7%	6,1%	29,4 %	6,3%	0%	36.250.000	-0,00675
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.000.000	15.000.000	113.496.900	105.000.000	105.000.000	15.000.000	14.500.000	105.000.000	33.050.000	-	4,3%	4,2%	29,8 %	9,6%	0%	22.500.000	-0,01075
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	4.500.000	5.000.000	-	-	0%	22,5 %	25,7 %	0%	0%	1.250.000	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	10.000.000	108.496.900	100.000.000	100.000.000	15.000.000	10.000.000	100.000.000	33.050.000	-	4,5%	3%	30%	10,2 %	0%	21.250.000	-0,01125
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	-	42.293.800	63.000.000	55.000.000	55.000.000	-	19.644.800	55.000.000	-	-	0%	9,2%	28,6 %	0%	0%	13.750.000	0
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	-	31.971.700	38.000.000	25.000.000	25.000.000	-	12.655.800	25.000.000	-	-	0%	10,6 %	24,9 %	0%	0%	6.250.000	0

Uraian Sesuai Kewenangan Kepala Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	10.322.100	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	6.989.000	15.000.000	-	-	0%	12,7%	28,9%	0%	0%	3.750.000	0
Fasilitasi Pemanpaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	10.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	3.250.000	-	0%	0%	37,5%	7,3%	0%	3.750.000	3,4694 E-18
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	15.001.000	8.251.000	-	-	1.200	-	-	-	0,1%	-	-	-	2.062.750	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	50%	-	-	25	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	50%	-	-	25	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	50%	-	-	25	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	-	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	50%	-	-	25	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	50%	-	-	25	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	50%	-	-	25	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan	-	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	50%	-	-	25	

Uraian Sesuai Kewenangan Kepala Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	7.500.000	750.000	-	-	100	7.195.000	-	-	0,1%	87,3 %	-	-	187.500	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-			-	-		
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	-	7.500.000	7.500.000	-	-	100	5.490.000	-	-	0,1%	36,6 %	-	-	1.875.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	50%	-	-	25	
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	50%	-	-	25	
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)						-	-		-	-	-	-	50%	-	-	25	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000	24.780.000	80.000.000	50.000.000	50.000.000	15.000.000	24.727.300	50.000.000	-	-	6,9%	11,3 %	22,8 %	0%	0%	8.750.000	-0,01725
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	18.990.700	35.000.000	35.000.000	35.000.000,00	-	18.938.000	35.000.000	15.857.000,00	-	0%	15,3 %	28,3 %	12,8 %	0%	8.750.000	0
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	10.730.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	10.730.000	10.000.000	3.737.000	-	0%	26,4 %	24,6 %	9,2%	0%	2.500.000	0
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	8.260.700	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	8.208.000	25.000.000	12.120.000	-	0%	9,9%	30,1 %	14,6 %	0%	6.250.000	0
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.000.000	5.789.300	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5.789.300	15.000.000	-	-	15,7 %	6,1%	15,7 %	0%	0%	-	-0,03925
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	5.789.300	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5.789.300	15.000.000	-	-	15,7 %	6,1%	15,7 %	0%	0%	-	-0,03925

Uraian Sesuai Kewenangan Kepala Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000	91.983.300	139.000.000	74.336.000	79.000.000	15.000.000	73.754.300	74.336.000	32.109.000	-	3,8%	18,5 %	19,6 %	10,2 %	0%	16.000.000	-0,0095
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000	91.983.300	139.000.000	74.336.000	79.000.000	15.000.000	73.754.300	74.336.000	32.109.000	-	3,8%	18,5 %	19,6 %	10,2 %	0%	16.000.000	-0,0095
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	12.784.700	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	18.889.700	10.000.000	9.424.000	-	0%	44,2 %	20,5 %	19,3 %	0%	2.500.000	0
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.000.000	-	35.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	3.250.000	-	18,8 %	0%	18,8 %	5,5%	0%	-	-0,047
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	34.949.000	34.000.000	14.000.000	14.000.000	-	14.964.800	14.000.000	9.165.000	-	0%	15,5 %	18,2 %	16,1 %	0%	3.500.000	0
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	6.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	-	2.750.000	5.000.000	-	-	0%	15,3 %	33,9 %	0%	0%	1.250.000	0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	38.249.600	58.000.000	30.336.000	35.000.000	-	37.149.800	30.336.000	10.270.000	-	0%	23%	19%	7,8%	0%	8.750.000	0
Persentase Desa Beradministrasi Baik																	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.000.000	58.210.000	63.000.000	61.000.000	65.000.000	75.000.000	39.982.800	61.000.000	29.899.900	-	23,3 %	12,5 %	20,1 %	10%	0%	- 2.500.000	-0,05825
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.000.000	58.210.000	63.000.000	61.000.000	65.000.000	75.000.000	39.982.800	61.000.000	29.899.900	-	23,3 %	12,5 %	20,1 %	10%	0%	- 2.500.000	-0,05825
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	13.762.800	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	6.829.000	10.000.000	4.160.000	-	0%	15,7 %	27,2 %	11,3 %	0%	2.500.000	-3,469E-18
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	50.000.000	5.647.200	13.000.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	5.350.000	25.000.000	-	-	42,2 %	4,6%	21,2 %	0%	0%	- 6.250.000	-0,1055
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	20.000.000	-	6.000.000	10.000.000	-	10.620.000	6.000.000	-	-	0%	29,5 %	22,6 %	0%	0%	2.500.000	0

Uraian Sesuai Kewenangan Kepala Daerah	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	25.000.000	18.800.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	17.183.800	20.000.000	29.899.900	-	20,2 %	13,9 %	16,4 %	29,3 %	0%	- 1.250.000	-0,0505
JUMLAH	4.704.974.000	5.378.793.400	4.920.884.500	4.545.367.968	4.552.281.968	4.704.974.000	4.519.238.411	4.530.368.168	2.082.025.441	-	19,6 %	18,8 %	19,5 %	9,2%	0%	- 38.173.008	-0,0490

Sumber data : Hasil Analisi Kecamatan Pasirjambu, 2025

Tabel 2.13 merupakan tabulasi data yang menampilkan anggaran dan realisasi pendanaan terhadap pelayanan Kecamatan Pasirjambu mulai dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Dari tabel tersebut menyajikan informasi bahwa rata-rata Rasio realisasi dan anggaran komulatif sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2026 sebesar 92,29%, angka tersebut diperoleh dengan cara melakukan rata-rata nilai Rasio realisasi dan anggaran, berikut disajikan cara menghitungnya :

$$= \frac{\text{(RRA Keg-1 + RRA Keg-2 + RRA Keg-3 + RRA Keg-4 + ... + RRA Keg-N)}}{\text{Jumlah Kegiatan}}$$

$$= \frac{\text{(99,30\% + 100,00\% + 96,40\% + 66,50\% + ... + N\%)}}{\text{51 Kegiatan}}$$

$$= \frac{\text{(4707\%)}}{\text{51 Kegiatan}}$$

$$= 92{,}29\%$$

Keterangan :

RRA Keg-1	: Rasio antara realisasi dan anggaran pada Kegiatan ke 1 RRA
Keg-2	: Rasio antara realisasi dan anggaran pada Kegiatan ke 2 RRA
Keg-3	: Rasio antara realisasi dan anggaran pada Kegiatan ke 3 RRA
Keg-4	: Rasio antara realisasi dan anggaran pada Kegiatan ke 4 RRA
Keg-N	: Rasio antara realisasi dan anggaran pada Kegiatan ke N

Dengan cara yang sama dapat dihitung rata-rata rasio realisasi dan anggaran kumulatif pada tahun 2022 sampai dengan 2026. Berikut disajikan trend data secara selengkapnya :

Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Rasio Capaian Realisasi dan Anggaran



Sumber data : Hasil Analisi Kecamatan Pasirjambu, 2025

Perkembangan data Rasio diatas telah selaras dengan tipe *Logarithmic Trendline*, dengan Nilai 92,29%. Sepertihalnya capaian pada Tabel 2.13, Rasio capaian realisasi dan anggaran pun dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang telah direalisasikan pada Akhir Tahun Anggaran dan merupakan pengaruh dari faktor kualitas layanan Kecamatan Pasirjambu yang telah mampu melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat seusai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pada Tabel 2.13, disajikan pula informasi mengenai rata-rata pertumbuhan anggaran dan pertumbuhan realisasi anggaran. Kedua jenis data ini akan memberikan informasi penting mengenai pertumbuhan data dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Bila pertumbuhan data ditandai dengan negatif (-) hal ini memberi tanda bahwa rata-rata pertumbuhan data bersifat menurun, semakin besar angka negatifnya maka semakin besar juga kesenjangan data penurunannya. Begitu pula sebaliknya bila pertumbuhan data ditandai dengan positif (+) hal ini memberi tanda bahwa rata-rata pertumbuhan data bersifat menaik, semakin besar angka positifnya maka semakin besar juga kesenjangan data kenaikannya. Dengan cara yang sama dapat dihitung rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasinya Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021 untuk setiap kegiatan.

Dapat disimpulkan secara umum pertumbuhan anggaran Kecamatan Pasirjambu dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 menggambarkan alokasi anggaran pola menurun dengan nilai Rp. -3.609.903, begitu pula dengan realisasi anggaran mengikuti pola yang sama yakni indikasi pola menurun dengan nilai Rp. -4.031.784 Untuk memberikan visualisasi, kami sajikan pada grafik berikut ini :

Gambar 2.4 Grafik Perkembangan Data Anggaran dan Realisasi



Sumber data : Hasil Analisi Kecamatan Pasirjambu, 2025

Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target



Sumber data : Hasil Analisi Kecamatan Pasirjambu, 2025

Dari semua penjelasan berdasarkan tabel, gambar dan grafik menunjukan bahwa Kecamatan Pasirjambu dalam melaksanakan tugasnya merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan / dilaksanakan dengan efisien dan adaptif, tidak melebihi pagu anggaran yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, namun target kinerja pelayanan secara kumulatif tetap terealisasi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pasirjambu

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang tepat sasaran dan berkualitas, Kecamatan Pasirjambu sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tersedianya berbagai layanan dasar secara cepat, mudah, akuntabel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, kelompok sasaran layanan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dikategorikan sebagai berikut:

1. Warga Masyarakat Umum

   Kelompok ini merupakan penerima utama layanan administrasi dasar, seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan publik.

2. Kelompok Rentan

   Kelompok ini mencakup lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan korban bencana. Mereka menjadi sasaran prioritas dalam program bantuan sosial, akses layanan publik yang inklusif, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Pemerintah Desa

   Sasaran layanan ini berkaitan dengan dukungan teknis dan administratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pemberian rekomendasi dalam rangka pencairan keuangan desa, pembinaan kelembagaan, serta fasilitasi koordinasi program pembangunan desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

2.1.5 Mitra Kecamatan Pasirjambu dalam Pemberian Pelayanan

1. Mitra Internal Pemerintah
   a) Pemerintah Kabupaten Bandung terutama perangkat daerah terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.
   b) Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Pasirjambu sebagai ujung tombak pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
   c) Badan/Dinas Teknis misalnya Bappeda, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup.
2. Mitra Eksternal (Vertikal dan Lintas Sektor)
   a) Instansi Vertikal Polsek Pasirjambu, Koramil, BPN (Badan Pertanahan Nasional), KUA, Puskesmas.
   b) BUMN/BUMD seperti PLN, PDAM Tirta Raharja, Telkom, Bank BJB, dan PT. Geo Dipa Energi.
   c) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan jaminan sosial dan kesehatan.
3. Mitra Masyarakat
   a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Karang Taruna, PKK, Ormas, Majelis Taklim).
   b) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda sebagai jembatan komunikasi pelayanan publik.
   c) Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan wadah masyarakat dalam memberikan masukan terkait kualitas layanan.
4. Mitra Dunia Usaha
   a) Pelaku Usaha Lokal (UMKM, koperasi, pengusaha) yang berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dan CSR.
   b) Perbankan/Finansial sebagai mitra dalam mendukung layanan pembayaran non-tunai dan inklusi keuangan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pasirjambu

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti

pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. RPJMN Tahun 2025– 2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, wilayah Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat ekonomi nasional, Pulau Jawa memiliki beban yang kompleks, mulai dari inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi dalam industri, hingga ketimpangan infrastruktur dan kerentanan terhadap bencana. Selain itu, permasalahan sosial seperti *mismatch* keterampilan dengan kebutuhan industri, tingginya angka kemiskinan, serta persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting dan TBC juga menjadi isu yang harus segera ditangani. Untuk itu, identifikasi isu prioritas dan strategis menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan yang efektif guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa dengan skala yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Jawa, seperti inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi industri, kesenjangan infrastruktur, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, juga ditemukan di Kabupaten Bandung, meskipun dengan akar masalah yang lebih kontekstual. Dalam konteks Kabupaten Bandung, tantangan pembangunan utama terkait dengan:

- Belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam
- Pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien
- Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kecamatan Pasirjambu sebagai bagian dari Kabupaten Bandung turut merasakan tantangan pembangunan yang memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Salah satu isu krusial yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan Kesehatan. Keterbatasan konektivitas menyebabkan mobilitas penduduk antar wilayah menjadi kurang optimal, menghambat distribusi ekonomi lokal, serta memperlebar kesenjangan antara desa-desa di Kecamatan Pasirjambu dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah lainnya. Akses pendidikan juga menjadi tantangan serius, terutama pada jenjang menengah atas, ditandai dengan tidaknya terdapat satu pun Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Kecamatan Pasirjambu. Selain itu, layanan kesehatan yang belum merata dan fasilitas yang terbatas memperparah tantangan sosial di masyarakat. Kondisi ini secara keseluruhan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya daya saing lokal, dan terhambatnya percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kecamatan Pasirjambu.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati Bandung terpilih, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025- 2029. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi Kabupaten Bandung beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Memadai

Tabel 2.13 Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia
1	Kualitas SDM yang belum memadai
2	Terbatasnya akses layanan pendidikan dan kesehatan
3	Masih adanya tantangan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk isu stunting dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4	Mengatasi ketimpangan pendapatan masyarakat
5	Ketimpangan gender yang masih terjadi, terutama dalam akses ekonomi dan politik bagi perempuan

*Sumber: Analisis Bapperida, 2025

2. Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Tabel 2.14 Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan
1	Rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja
2	Pengoptimalan sektor pertanian dan jasa kesehatan
3	Ketahanan pangan yang masih perlu ditingkatkan
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja belum optimal, terutama bagi tenaga kerja berpendidikan rendah dan penyandang disabilitas
5	Ketimpangan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga
6	Penguatan sektor unggulan salah satunya industri pengolahan
7	Penguatan sektor wisata
8	Kurangnya kolaborasi dan integrasi ekonomi untuk mendukung ekonomi kreatif

*Sumber: Analisis Bapperida, 2025

3. Kendala dalam Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 2.15 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
1	Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat
2	Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi *dynamic goverment*
3	Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital pemerintahan

*Sumber: Analisis Bapperida, 2025

4. Tantangan Infrastruktur dan Lingkungan

Tabel 2.16 Tantangan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan
1	Adanya degradasi lingkungan, akibat kurangnya pengendalian pemafaatan ruang, pencemaran lingkungan, deforestasi, dan pengelolaan sampah yang belum maksimal
2	Belum optimalnya pemerataan akses infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kab.Bandung
3	Belum optimalnya pembangunan wilayah, terutama dalam aspek infrastruktur, hunian, dan kualitas lingkungan
4	Terbatasnya daya dukung penyediaan pangan dan penyediaan air

*Sumber: Analisis Bapperida, 2025

5. Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel 2.17 Tantangan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Urutan Prioritas	Tantangan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum yang perlu Ditingkatkan
2	Koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan
3	Tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama

*Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kabupaten Bandung yang dihadapi, terdapat beberapa tantangan pembangunan krusial yang perlu mendapatkan perhatian oleh Kecamatan Pasirjambu. Rendahnya partisipasi dalam pelatihan keterampilan dan minimnya fasilitas pendidikan non-formal menyebabkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal masih tertinggal. Tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa masih menghadapi kendala dalam hal digitalisasi layanan, keterbatasan kapasitas aparatur, serta koordinasi lintas sektoral yang belum optimal. Pelayanan publik belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama administrasi kependudukan. Selain itu tantangan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, saluran drainase, dan sanitasi masih belum merata dan memadai, beberapa desa mengalami banjir lokal saat musim hujan karena sistem drainase yang buruk. Persampahan juga menjadi persoalan yang belum tertangani secara sistemik.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditunjukan untuk mengidentifikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan Kecamatan Pasirjambu sehingga dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan proritas wilayah pelayanan Kecamatan Pasirjambu dalam jangka panjang (biasanya 20 tahun) mendatang.

Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Pasirjambu terletak di sebelah Selatan Ibu Kota Kabupaten Bandung (Soreang), mempunyai Luas Wilayah 23.958 Ha, dengan jarak tempuh dari pusat perkantoran Kabupaten Bandung kurang lebih 5 km dan merupakan salah satu Kecamatan dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung yang terdiri dari 10 Desa, 44 Dusun, 163 RW dan 586 RT. Dengan kepadatan penduduk rata-rata 1 / 3.956 Km / Jiwa.

Besarnya angka pertumbuhan penduduk terjadi karena tingginya perpindahan penduduk dari luar daerah yang masuk ke wilayah Kecamatan Pasirjambu sebagai konsekuensi logis dari berbagai kegiatan pertanian, perdagangan, usaha jasa lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Pasirjambu.

Adapun batasan – Batasan wilayah Kecamatan Pasirjambu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Soreang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Cianjur
- Sebelah Timur : Kecamatan Soreang dan Pangalengan
- Sebelah Barat : Kecamatan Ciwidey dan Rancabali

Kecamatan Pasirjambu mempunyai ketinggian 1050 m di atas permukaan laut (dpl) bertopografi datar dengan suhu maksimal 25°C dan suhu mininum 32°C Wilayah Kecamatan dengan curah hujan rata-rata 551

mm / Tahun adapun bentuk wilayah Kecamatan Pasirjambu adalah sebagai berikut :

- Datar sampai berombak : 20 %
- Berombak sampai berbukit : 50 %
- Berbukit dapat bergunung : 30 %

Adapun Wilayah Kerja Kecamatan Pasirjambu sebagai perangkat Daerah meliputi 10 (Sepuluh) Desa yang terdiri dari :

1. Desa Cukanggenteng
2. Desa Cibodas
3. Desa Cisondari
4. Desa Cikoneng
5. Desa Mekarsari
6. Desa Mekarmaju
7. Desa Margamulya
8. Desa Tenjolaya
9. Desa Sugihmukti
10. Desa Pasirjambu

Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah yang terarah, Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044, Kabupaten Bandung menetapkan sejumlah kawasan strategis berdasarkan skala pelayanannya. Rencana struktur ruang yang berkaitan dengan Wilayah Kecamatan Pasirjambu adalah sebagai berikut :

1. Pola Ruang dan Fungsi Kawasan
    a. Kawasan lindung
        - Hutan lindung di sekitar kawasan Gunung Tilu, Gunung Patuha, dan sebagian wilayah selatan.
        - Sempadan sungai dan daerah resapan air (penting karena Pasirjambu adalah daerah hulu DAS Citarum).
        - Kawasan rawan bencana (longsor) di lereng-lereng perbukitan.
    b. Kawasan budidaya
        - Pertanian lahan basah: persawahan di lembah dan bantaran sungai.
        - Perkebunan: teh (Walini, Rancabali), kopi, sayuran hortikultura.
        - Permukiman perdesaan: tersebar di sepanjang jalan penghubung utama, dengan pusat pertumbuhan di sekitar ibukota kecamatan.

- Pariwisata: Kawah Putih, Perkebunan Teh Rancabali, Pemandian Air Panas Ciwalini, wisata agro.

2. Struktur Ruang
   a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL):
      - Ibukota Kecamatan Pasirjambu sebagai pusat pelayanan dasar pemerintahan, perdagangan, dan jasa.
   b. Jaringan transportasi:
      - Jalan kolektor primer yang menghubungkan Soreang – Ciwidey – Pasirjambu – Rancabali.
      - Jalan lokal penghubung ke desa-desa dan sentra produksi pertanian.
      - Potensi pengembangan akses wisata berbasis jalan kolektor dan jalan alternatif ke wilayah Pangalengan.
   c. Jaringan prasarana wilayah:
      - Sistem irigasi pertanian (teknis dan setengah teknis).
      - Sistem energi listrik (PLN) dan potensi energi terbarukan (mikrohidro, panas bumi).
      - Telekomunikasi berbasis seluler dan fiber optik yang sedang berkembang.
3. Arah Pengembangan Ruang
   a. Penguatan kawasan lindung untuk menjaga keberlanjutan hulu DAS Citarum.
   b. Pengembangan agropolitan berbasis pertanian, hortikultura, dan perkebunan.
   c. Pengembangan pariwisata alam dan agro yang terintegrasi dengan Ciwidey–Rancabali.
   d. Pengendalian permukiman agar tidak melebar ke kawasan rawan longsor dan kawasan lindung.
   e. Pengembangan pusat pelayanan kecamatan sebagai simpul distribusi hasil pertanian dan wisata.
4. Keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Bandung
   a. Masuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bandung Selatan.
   b. Mendukung fungsi konservasi, agropolitan, dan pariwisata unggulan.
   c. Bagian dari koridor Bandung, Soreang, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali sebagai destinasi wisata prioritas.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian mengenai isu-isu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 9 isu PB strategi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.18 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
1	Belum optimalnya akses sanitasi (air minum layak, limbah domestik dan persampahan) sebagai Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Kesehatan masyarakat	TPB 6: Akses sanitasi dan air bersih Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
2	Tingginya alih fungsi lahan menyebabkan semakin menurunnya proporsi tutupan lahan	TPB 15: Ekosistem daratan Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
3	Belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor eknomi berakibat kurangnya peningkatan daya saing	TPB 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
		TPB 9: Industri, inovasi, dan infrstruktur Membangun infrastruktur yang tangguh, mningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, srta mendorong inovasi
		TPB 17: Kemitraan untuk mencapai tujuan Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
4	Tingginya kerentanan masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	TPB 1: Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun

No	Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator	TPB yang mendukung Isu PB
		TPB 2: Mengakhiri kelaparan Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
5	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 3: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
		TPB 4: Pendidikan bermutu Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
		TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
6	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
		TPB 1: Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun
7	Tingginya kerentanan maskrayakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	TPB 1: Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun
8	Belum optimalnya pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat	TPB 3: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
		TPB 3: Kesehatan yang baik dan kesejahteraan Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
9	Belum optimalnya pencatatan akta kelahiran sehingga kesulitan daam memantau angka kelahiran akurat berdampak pada angka fertility rate dan angka kematian ibu meningkat	TPB 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

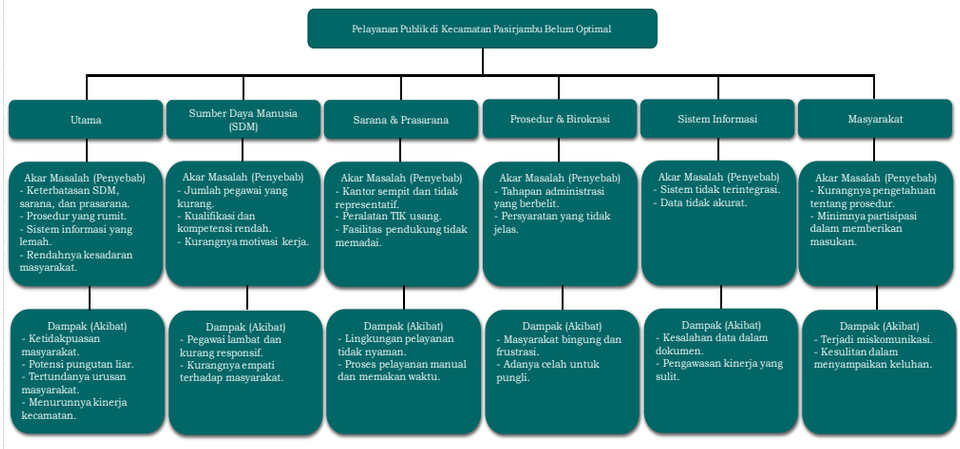
*Sumber: KLHS RPJMD, 2025

Sebagai wilayah administratif yang terus mengalami perkembangan, Kecamatan Pasirjambu memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian isu-isu pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Pasirjambu berkomitmen untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* / SDGs) melalui pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan di wilayah Kecamatan Pasirjambu diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, serta ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pasirjambu

Gambar 2.6 Pohon Masalah Kecamatan Pasirjambu



Sumber: Analisis Kecamatan Pasirjambu, 2025

Sebagai wilayah administratif yang terus mengalami perkembangan, Kecamatan Pasirjambu memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian isu-isu pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Pasirjambu berkomitmen untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* / SDGs) melalui pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan di wilayah Kecamatan Pasirjambu diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, serta ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai Secara kuantitatif, jumlah aparatur yang tersedia saat ini belum sebanding dengan beban kerja yang semakin kompleks, seiring dengan peningkatan tuntutan pelayanan masyarakat dan dinamika kebijakan pemerintah. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program kerja dan keterlambatan dalam proses pelayanan administratif. Dari sisi kualitas, sebagian aparatur belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan, baik dari aspek pendidikan formal maupun keterampilan teknis.
2. Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, selain itu proses pelaporan dan evaluasi kinerja aparatur sering kali belum konsisten dan belum digunakan secara maksimal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Keterbatasan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kurangnya pembinaan dan pendampingan teknis secara berkala, juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan sistem ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus strategis dalam Upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat setiap tahun, perlu upaya peningkatan kualitas agar kepuasan dapat terus terjaga secara berkelanjutan.
4. Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib Permasalahan yang muncul diantaranya adalah masih lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, seperti penyusunan APBDes, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal ini seringkali mengakibatkan keterlambatan laporan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan, serta kurang lengkapnya bukti administrasi keuangan. Kecamatan Pasirjambu sebagai pembina tingkat kecamatan perlu lebih meningkatkanpembinaan, fasilitasi, verifikasi, rekomendasi, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban.
5. Terdapat wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, dan permasalahan sampah liar Kecamatan Pasirjambu menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, serta permasalahan sampah liar yang belum tertangani secara optimal.

2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Sehingga,

isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 terdapat Isu strategis yang meliputi tujuh kelompok besar isu yang didalamnya mencakup permasalahan-permasalahan terkait dengan bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yaitu:

1. Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana;
2. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan.
4. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
5. Peningkatan Infrastruktur dasar dan Pengembangan Wilayah
6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
7. Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat

Isu strategis sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung mengacu pada isu strategis RPJMD Kabupaten Bandung yang ke 6 yaitu “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan”. Transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong efisiensi dalam pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut telah ditentukan isu strategis sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu. Isu strategis Kecamatan Pasirjambu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pasirjambu

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIRJAMBU
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian (sayuran, hortikultura, perkebunan teh, kopi)	Produktivitas rendah, keterbatasan akses pasar & teknologi	Ketersediaan lahan berkelanjutan & tata guna lahan	Perubahan iklim global memengaruhi pola tanam	Ketahanan pangan nasional & kemandirian pertanian	Penurunan kualitas lahan pertanian di Bandung Selatan	Peningkatan produktivitas pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan
Pariwisata (wisata alam Pasirjambu, agrowisata)	Infrastruktur pariwisata kurang memadai, promosi lemah	Daya dukung lingkungan, konservasi kawasan wisata	Tren wisata berkelanjutan (eco-tourism)	Prioritas pariwisata berkelanjutan dalam RPJMN	Pariwisata Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali sebagai destinasi unggulan Jabar	Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis alam & budaya lokal
UMKM & ekonomi kreatif	Akses permodalan terbatas, daya saing rendah	Pengelolaan sumber daya lokal yang adil & berkelanjutan	Digitalisasi ekonomi global	Penguatan UMKM dalam ekonomi nasional	Program UMKM unggulan Jabar Juara	Penguatan UMKM berbasis kearifan lokal dan digitalisasi
Sumber daya air (hulu DAS Citarum, mata air, danau)	Degradasi lingkungan, pencemaran, alih fungsi lahan	Konservasi sumber daya air & kehutanan	Krisis air bersih global	Rehabilitasi DAS Citarum	Program Citarum Harum di Jabar	Konservasi sumber daya air & lingkungan untuk keberlanjutan
Kependudukan & SDM (tenaga kerja usia produktif)	Pengangguran & urbanisasi tinggi	Akses pendidikan & pelatihan vokasi	Kompetisi tenaga kerja global	Bonus demografi nasional	Program Jabar Future Skills	Peningkatan kualitas SDM dan lapangan kerja lokal
Infrastruktur & pelayanan publik	Kualitas jalan & akses internet belum merata	Aksesibilitas layanan dasar & infrastruktur hijau	Smart city & green infrastructure	Pembangunan infrastruktur merata	Infrastruktur wilayah Bandung Selatan	Peningkatan infrastruktur dasar & layanan publik berbasis digital
Ketahanan bencana (rawan longsor, banjir)	Penataan ruang & mitigasi bencana lemah	Kerentanan & daya adaptasi bencana	Pemanasan global meningkatkan intensitas bencana	Prioritas nasional penanggulangan bencana	Bandung Selatan rawan bencana alam	Peningkatan mitigasi & kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Pasijambu 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025–2029 pada prinsipnya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, serta selaras dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

NSPK menegaskan bahwa kecamatan memiliki fungsi strategis sebagai perangkat daerah yang menjalankan sebagian kewenangan Bupati dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pembangunan wilayah, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan landasan tersebut, Kecamatan Pasirjambu diarahkan untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan berkualitas, memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, serta mendorong pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 disusun untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabililtas kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat bagi masyarakat pada khususnya.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas“. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berahlak Serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan bagi anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah Dan pelayanan publik yang Partisipatis, Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatkan Kualitas Infrastuktur yang terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan;
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kecamatan Pasirjambu sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan administrasi yang cepat, mudah, dan akuntabel. Selama periode perencanaan lima tahunan 2025–2029, Kecamatan Pasirjambu menetapkan tujuan strategis yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik". Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan peran Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di tingkat wilayah yang menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan dasar bagi masyarakat. Pelayanan publik yang dimaksud tidak hanya menyangkut layanan administrasi kependudukan, tetapi juga mencakup fasilitasi program pembangunan, pengaduan masyarakat, koordinasi antar lembaga, serta pembinaan kepada pemerintah desa.

Tujuan ini juga sejalan dengan misi ketiga Kabupaten Bandung, yaitu "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel". Dengan mengacu pada misi tersebut, Kecamatan Pasirjambu diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya aparatur, memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, serta membangun sistem kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tujuan tersebut tidak hanya menjadi target internal Kecamatan, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

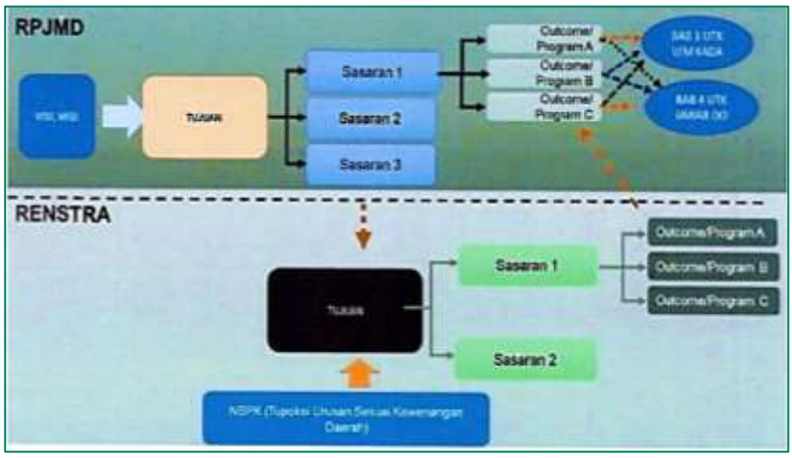
3.1.2 Sasaran

Sasaran pembangunan Kecamatan Pasirjambu pada periode 2025–2029 diarahkan untuk menjawab tantangan strategis, memanfaatkan potensi wilayah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung. Sasaran Pembangunan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Sebagai implementasi dari Tujuan Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik", Kecamatan Pasirjambu juga telah menetapkan satu Sasaran yaitu "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan" sebagai fokus pembangunan jangka menengah Tahun 2025–2029. Sasaran ini menjadi landasan utama dalam mendorong transformasi layanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung terciptanya tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien serta melayani.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Konsep Renstra, Gambar Kerangka Keterikatan Sasaran RPJMD dengan Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasirjambu, dibawah ini :

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Pasirjambu



Sumber data : RPJMD Kabupaten Bandung, 2025-20209

Gambar 3.2 Kerangka Keterikatan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan Pasirjambu



Sumber data : RPJMD Kabupaten Bandung, 2025-20209

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasirjambu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,19	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,87	92,08	92,30	92,53	92,77	93,02	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pasijambu 2025

3.2 Strategi Kecamatan Pasirjambu dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang dijadikan dasar dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan agar pelaksanaannya selaras dengan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Strategi yang ditetapkan juga sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, sehingga mampu menjawab isu-isu strategis pelayanan publik yang berkembang di masyarakat. Strategi-strategi yang dimaksud antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) aparatur kecamatan melalui program pengembangan kompetensi, pelatihan teknis, serta pembinaan berkelanjutan guna menciptakan aparatur yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap perubahan.
2. Meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penguatan budaya kinerja yang berbasis hasil, melalui perencanaan yang terukur, pelaporan kinerja yang akuntabel, serta evaluasi yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, dengan mendorong penyederhanaan prosedur layanan, pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kepuasan masyarakat.
4. Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya dalam menangani isu-isu strategis seperti pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan penataan ruang wilayah kecamatan.

Strategi Renstra Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dirancang kemudia secara bertahap dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan berbasis kinerja. Penahapan ini menggambarkan urutan logis dan sistematis dari setiap strategis yang dibutuhkan untuk menciptakan transformasi pelayanan publik secara menyeluruh. Adapun penahapan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

Tahap I Tahun 2026 : Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan Masyarakat dan Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal Langkah ini dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan standar layanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur kecamatan agar mampu menjalankan tugas dengan efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai sehingga masyarakat mendapatkan kenyamanan, kepastian, dan kualitas layanan yang lebih baik.
4. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pendekatan partisipatif, berbasis data hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal, sehingga program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
5. Mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan potensi lokal sebagai kekuatan dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat Pasirjambu.

Tahap II Tahun 2027 : Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital dan Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal, tahap ini dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan standar layanan yang lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur kecamatan agar mampu menjalankan pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, sehingga tercipta layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.
4. Mengoptimalkan potensi lokal desa/kelurahan melalui kegiatan pemberdayaan yang inovatif, partisipatif, dan berbasis hasil pemetaan kebutuhan nyata masyarakat.
5. Menguatkan kemandirian dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, sehingga pembangunan di Kecamatan Pasirjambu dapat berlangsung inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tahap III Tahun 2028 : Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital dan Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor tahapan ini dumaksudkan untuk :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
2. Mendorong transformasi digital dalam tata kelola pelayanan, sehingga tercipta layanan yang lebih efisien, efektif, dan adaptif terhadap tuntutan zaman.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal di desa/kelurahan sebagai basis pembangunan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.
4. Meningkatkan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menciptakan solusi kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi.
5. Mewujudkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan Masyarakat dalam mendukung Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pasirjambu melalui layanan publik yang prima dan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Tahap IV Tahun 2029 : Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital dan Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor, tahapan ini dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang modern, responsif, dan berbasis teknologi digital, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur kecamatan dalam mengoperasikan sistem layanan digital agar pelayanan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal desa/kelurahan melalui program pemberdayaan yang inovatif, sehingga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
4. Menguatkan kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas) dalam mendukung pembangunan wilayah secara terpadu.
5. Mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pasirjambu melalui pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Tahap V Tahun 2030 : Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan dan Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan, tahapan ini dimaksudkan untuk :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, cepat, transparan, dan akuntabel dengan dukungan teknologi digital yang terus diperbarui sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan melalui mekanisme layanan yang mudah diakses, partisipatif, dan berorientasi pada kualitas.

2. Mengoptimalkan potensi lokal desa/kelurahan dengan program pemberdayaan yang inovatif, kreatif, serta berkelanjutan, sehingga memberi dampak nyata pada peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk mendukung pencapaian pembangunan yang inklusif dan terpadu.
4. Mendorong kemandirian, kesejahteraan, dan ketahanan masyarakat Kecamatan Pasirjambu melalui tata kelola pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan keberhasilan tujuan, sasaran, indikator Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 pencapaiannya ditunjang dengan penahapan Renstra Kecamatan pasirjambu sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Pasirjambu

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pasirjambu, 2025

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pasirjambu dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029

Perumusan arah kebijakan Kecamatan Pasirjambu untuk periode tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam menjabarkan dan menerjemahkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, serta sebagai bentuk wujud nyata terhadap mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pasirjambu.

Berikut ini disajikan tabel Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pasirjambu :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Renstra Kecamatan Pasirjambu

No	Operasionalisasi NSPK /Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

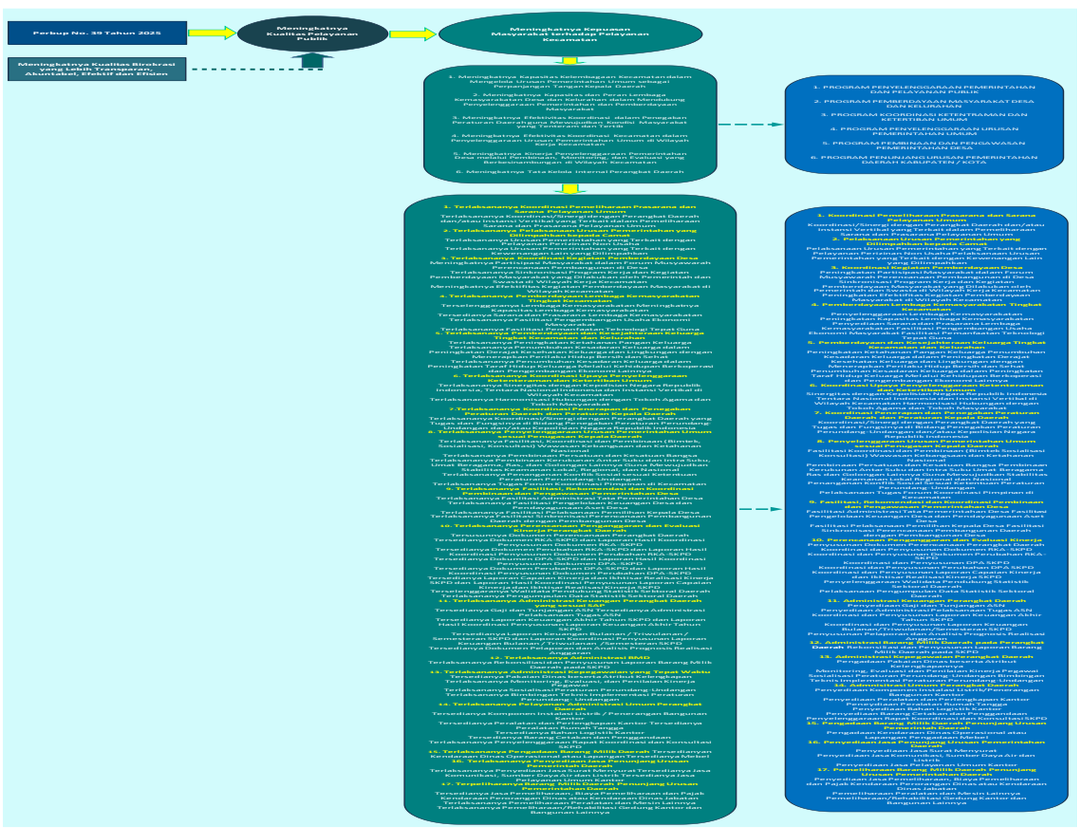
Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pasirjambu, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 - 2029 didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Untuk merumuskan program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Kecamatan Pasirjambu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD



Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pasirjambu, 2025

Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

Sesuai dengan visi misi, strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka Kecamatan Pasirjambu mempunyai 6 (enam) Program, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelanggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya dalam merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dalam Mengelola Urusan Pemerintahan Umum sebagai Perpanjangan Tangan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang ditargetkan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana : Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terlaksana : Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta yang terpelihara : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kepbup 137 Tahun 2023
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Direncanakan x100%
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan yang terlaksana : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan yang direncanakan x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang terlaksana : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang direncanakan x 100%
			Meningkatnya Kapasitas dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	DO: Permen 81 Tahun 2015
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana : Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang terlaksana : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang terlaksana : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang terlaksana : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi yang terlaksana : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan yang terlaksana : yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya yang terlaksana : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan yang direncanakan x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang terlaksana : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang terlaksana : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana : Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat yang terlaksana : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang terlaksana : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri yang terlaksana : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah yang terlaksana : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah yang direncanakan x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing yang terlaksana : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang terlaksana : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya yang terlaksana : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup yang terlaksana : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam yang terlaksana : Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga yang terlaksana : Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas yang terlaksana : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas yang direncanakan x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
			Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dalam Penegakan Peraturan Daerah guna Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tenteram dan Tertib		Persentase Koordinasi Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana : Jumlah Koordinasi Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana : Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang terlaksana : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang terlaksana : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana : Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang direncanakan x 100%
			Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kerja Kecamatan		Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang terlaksana : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang terlaksana : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional yang terlaksana : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terlaksana : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang direncanakan x 100%
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi yang Berkesinambungan di Wilayah Kecamatan		Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	DO: Permen 81 Tahun 2015
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina dan Diawasi yang terlaksana : Jumlah Desa yang Dibina dan Diawasi yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang terlaksana : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang terlaksana : Jumlah Dokumen Fasilitasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
							dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terlaksana : yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa yang terlaksana : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa yang direncanakan x 100%
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
					2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah		
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terlaksana : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang terlaksana : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang terlaksana : Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang terlaksana : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang direncanakan x 1001%
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang terlaksana : Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang terlaksana : Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang direncanakan x 1001%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
				dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang terlaksana : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah yang terlaksana : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu yang terlaksana : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang terlaksana : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terlaksana : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terlaksana : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terlaksana : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang terlaksana : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang terlaksana : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
				/ Triwulanan / Semesteran SKPD			Triwulanan / Semesteran SKPD yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang terlaksana : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD yang terlaksana : Jumlah Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang terlaksana : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang terlaksana : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang terlaksana : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terlaksana : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD yang terlaksana : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu yang terlaksana : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang terlaksana : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tidak ada di DPA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang terlaksana : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian yang terlaksana : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan yang direncanakan x 100% Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang terlaksana : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulanagan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan yang terlaksana : Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulanagan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang terlaksana : Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan yang terlaksana : Jumlah ASN yang dipindahtugaskan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang terlaksana : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan yang terlaksana : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang terlaksana : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Admnisitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana : Jumlah Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yang direncanakan x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peneydiaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang terlaksana : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terlaksana : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan rbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang terlaksana : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana : Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Tersedianyan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	Tidak ada di DPA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Laiannya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Terwujud	Tidak ada di DPA
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tidak ada di DPA
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tidak ada di DPA
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tidak ada di DPA
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tidak ada di DPA
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tidak ada di DPA
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yang terlaksana : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yang direncanakan x 100%
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam Kondisi Baik yang terlaksana : Jumlah BMD dalam Kondisi Baik yang direncanakan x 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN/DO
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya yang terlaksana : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya yang direncanakan x 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tidak ada di DPA
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tidak ada di DPA
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Tidak ada di DPA
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tidak ada di DPA
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tidak ada di DPA
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang terlaksana : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi yang terlaksana : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tidak ada di DPA
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Tidak ada di DPA

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pasirjambu, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2030)		KET.
Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	SubKegiatan					2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
KECAMATAN PASIRJAMBU										5.401.338.150		5.103.862.800		5.204.898.000		5.256.026.700		5.450.670.780		26.416.796.430	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					5.401.338.150		5.103.862.800		5.204.898.000		5.256.026.700		5.450.670.780		26.416.796.430	
7	01				KECAMATAN					5.401.338.150		5.103.862.800		5.204.898.000		5.256.026.700		5.450.670.780		26.416.796.430	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	60,00	61,00	4.563.721.150	61,50	4.461.430.000	62,00	4.461.430.000	62,50	4.461.430.000	63,00	4.461.430.000	63,00	22.409.441.150	Prog.1
						2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Poin	34,40	35,20		35,50		35,80		36,00		36,50		36,50		
7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Poin	80,40	81,00	36.500.000	81,50	17.000.000	82,00	17.000.000	82,50	17.000.000	83,00	17.000.000	83,00	104.500.000	Keg.1.1
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	3.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	3	2.000.000	11	11.000.000	Subkeg 1.1.1
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3	5.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	15	13.000.000	Subkeg 1.1.2
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4	4	5.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	20	13.000.000	Subkeg 1.1.3
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	4.500.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	10	12.500.000	Subkeg 1.1.4
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	3	4.500.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	15	12.500.000	Subkeg 1.1.5
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	4.500.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	15	12.500.000	Subkeg 1.1.6
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	5.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	5	15.000.000	Subkeg 1.1.7
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	10	10	5.000.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	50	15.000.000	Subkeg 1.1.8

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2030)		KET.
Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	SubKegiatan					2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	Persen	100	100	3.993.810.000	100	3.993.810.000	100	3.993.810.000	100	3.993.810.000	100	3.993.810.000	500	19.969.050.000	Keg.1.2
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	12	12	3.979.310.000	12	3.979.310.000	12	3.979.310.000	12	3.979.310.000	12	3.979.310.000	60	19.896.550.000	Subkeg 1.2.1
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	10	25.000.000	Subkeg 1.2.2
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	4	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	20	22.500.000	Subkeg 1.2.3
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	20	25.000.000	Subkeg 1.2.4
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Persen	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	25.000.000	Subkeg 1.2.5
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	Subkeg 1.2.6
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persen	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	25.000.000	Subkeg 1.2.7
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket														Subkeg 1.2.8
7	01	01	2.05	0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	15	25.000.000	Subkeg 1.2.9
7	01	1	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang														
7	01	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang														
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	120.240.750	100	118.000.000	100	118.000.000	100	118.000.000	100	118.000.000	100	592.240.750	Keg 1.3
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	60	60.000.000	Subkeg 1.3.1

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2030)		KET.
Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	SubKegiatan					2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	30	300.000.000	Subkeg 1.3.2
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	50	25.000.000	Subkeg 1.3.3
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	100	75.000.000	Subkeg 1.3.4
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	8.240.750	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	60	32.240.750	Subkeg 1.3.5
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	50	100.000.000	Subkeg 1.3.6
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	50.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	90.000.000	Keg 1.4
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit														
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	3	50.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	15	90.000.000	Subkeg 1.4.1
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	270.120.000	100	270.120.000	100	270.120.000	100	270.120.000	100	270.120.000	100	1.350.600.000	Keg 1.5
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan														
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	60	80.000.000	Subkeg 1.5.1
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	254.120.000	12	254.120.000	12	254.120.000	12	254.120.000	12	254.120.000	60	1.270.600.000	Subkeg 1.5.2
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	98,50	98,50	83.050.400	98,50	42.500.000	98,50	42.500.000	98,50	42.500.000	98,50	42.500.000	98,50	253.050.400	Keg 1.6
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	7	25.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	35	85.000.000	Subkeg 1.6.1
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	25	37.500.000	Subkeg 1.6.2
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	50.550.400	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	10	130.550.400	Subkeg 1.6.3
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit														

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2030)		KET.
Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	SubKegiatan					2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi															
7	01	02			S 3.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Umum dari Kepala Daerah kepada Camat	Persen	100	100	371.499.000	100	352.432.800	100	478.468.000	100	524.596.700	100	724.240.780	100	2.451.237.280	Prog 2
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persen	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	125.000.000	Keg 2.1
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000	Subkeg 2.1.1
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan	%	100	100	346.499.000	100	327.432.800	100	453.468.000	100	499.596.700	100	699.240.780	100	2.326.237.280	Keg 2.2
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	4.664.000	1	4.664.000	1	4.664.000	1	4.664.000	1	4.664.000	5	23.320.000	Subkeg 2.2.1
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	3	3	341.835.000	3	322.768.800	3	448.804.000	3	494.932.700	3	694.576.780	15	2.302.917.280	Subkeg 2.2.2
7	01	03			S 3.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	Persen	100	100	217.118.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	86.000.000	100	561.118.000	Prog 3
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	100	108.228.000	100	43.500.000	100	43.500.000	100	43.500.000	100	43.500.000	100	282.228.000	Keg 3.1
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	50	25.000.000	Subkeg 3.1.1
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	103.228.000	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000	5	257.228.000	Subkeg 3.1.2
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	Persen	100	100	58.890.000	100	39.500.000	100	39.500.000	100	39.500.000	100	39.500.000	500	216.890.000	Keg 3.2
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	10	10	41.390.000	10	22.000.000	10	22.000.000	10	22.000.000	10	22.000.000	50	129.390.000	Subke 3.2.1
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	75.000.000	Subkeg 3.2.2

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2030)		KET.
Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	SubKegiatan					2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	5	12.500.000	Subkeg 3.2.3
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	100	50.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	62.000.000	Keg 3.3
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga														
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan KelompokMasyarakat	Keluarga														
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	10	10	25.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	50	29.000.000	Subkeg 3.3.1
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga														
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga														
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yangBerkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga														
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan	Keluarga	10	10	15.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	50	19.000.000	Subkeg 3.3.2

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2030)		KET.
Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	SubKegiatan					2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	10	10	10.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	50	14.000.000	Subkeg 3.3.3
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga														
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga														
7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga														
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan MenujuKeluarga Berkualitas	Keluarga														
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	Prog 4
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	175.000.000	Sub 4.1
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000	Subkeg 4.1.1
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000	Subkeg 4.1.2
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	75.000.000	Keg 4.2

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2030)		KET.
Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	SubKegiatan					2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	3	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	15	75.000.000	Subkeg 4.2.1
7	01	05			S 3.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	124.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	440.000.000	Prog 5
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	124.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	440.000.000	Keg 5.1
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	50	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	250	50.000.000	Subkeg 5.1.1
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	100	100	60.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	500	120.000.000	Subkeg 5.1.2
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Orang	100	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	500	70.000.000	Subkeg 5.1.3
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	Subkeg 5.1.4
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	5	175.000.000	Subkeg 5.1.5
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	Persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	50.000.000	100	305.000.000	Prog 6
7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	Persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	50.000.000	100	305.000.000	Keg 6.1
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	Subkeg 6.1.1
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan	Dokumen	10	10	25.000.000	10	10.000.000	10	25.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	50	105.000.000	Subkeg 6.1.2

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (2030)		KET.
Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	SubKegiatan					2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					Pendayagunaan Aset Desa	Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen				8	40.000.000			1	10.000.000			9	50.000.000	Subkeg 6.1.3
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	10	10	45.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	50	125.000.000	Subkeg 6.1.4

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pasirjambu, 2025

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tanpa adanya dukungan dari Program, Kegiatan dan Subkegiatan misi 3 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel, Program Prioritas Pembangunan Daerah : Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik tidak dapat berjalan dengan baik berikut ini daftar Subkegiatan prioritas yang mendukung Proggram prioritas Pembangunan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam
Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan PublikPelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pasirjambu, 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk

standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).Indikator Kinerja Kecamatan Pasirjambu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pasirjambu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasirjambu

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	0,19	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pasirjambu, 2025

Dilihat dari Indikator periode Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Pasirjambu mempunyai 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Nilai Persentase BMD Dalam Kondisi Baik
3. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Persentase Desa Beradministrasi Baik

Yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasirjambu periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 adalah “Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)“.

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, pengyukuran kinerja menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Namun pada Tingkat Kecamatan, masih terdapat tantangan signifikan, salah satunya adalah belum tersedianya Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terstruktur dan terstandarisasi. Ketiadaan IKK ini menyebabkan sulitnya melakukan evaluasi kinerja secara obyektif, serta membatasi kemampuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan Kecamatan berdampak langsung terhadap Masyarakat. Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang Indikator kinerja kunci.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pasirjambu

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0,19	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Pasirjambu, 2025

Dilihat dari Indikator periode Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Pasirjambu mempunyai 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Nilai Persentase BMD Dalam Kondisi Baik
3. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Persentase Desa Beradministrasi Baik

Yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasirjambu periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 adalah “Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)“

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan pembangunan kecamatan dalam kurun waktu lima tahun yang disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, serta RPJMD Kabupaten Bandung. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah, landasan, dan kerangka kerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Renstra ini menegaskan bahwa pembangunan Kecamatan Pasirjambu diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, termasuk pengembangan pelayanan berbasis digital.
2. Penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan kecamatan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
3. Pengembangan potensi lokal di bidang pertanian, UMKM, dan pariwisata berkelanjutan sebagai motor penggerak perekonomian wilayah.
4. Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan pemetaan potensi lokal secara partisipatif.
5. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Kecamatan Pasirjambu dapat menjadi kecamatan yang adaptif, partisipatif, dan berdaya saing, serta mampu mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung. Implementasi Renstra akan dilakukan secara konsisten melalui mekanisme perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga setiap sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai acuan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Pasirjambu. Dokumen ini menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas kecamatan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Seluruhnya disusun dengan pendekatan teknokratis dan partisipatif yang berorientasi pada hasil, guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Kecamatan Pasirjambu mampu memperkuat peran strategisnya sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, serta mendukung secara nyata pencapaian visi Kabupaten Bandung yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasirjambu Periode 2025-2029 ini bertujuan untuk mengoptimalkan dalam usaha peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Pasirjambu dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Kecamatan Pasirjambu berkomitmen dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip efektivitas dalam pencapaian kinerja dengan penggunaan sumber daya yang efisien, dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). serta Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 ini merupakan salah satu upaya proses penyelarasan target capaian kinerja Kecamatan Pasirjambu.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 – 2029 adalah Dokumen acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kecamatan Pasirjambu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pasirjambu merupakan instrumen penting dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan visi, misi, serta arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung. Proses pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, guna menilai kesesuaian antara rencana dengan capaian di lapangan, termasuk penggunaan sumber daya dan pencapaian indikator kinerja.

Evaluasi dilaksanakan secara periodik untuk mengukur efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan, penyesuaian kebijakan, serta penyempurnaan perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya.

Pengendalian dan evaluasi juga dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, melalui pelibatan perangkat desa/kelurahan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pembangunan di Kecamatan Pasirjambu dapat terarah, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat secara berkelanjutan.

Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun kedepan, yang dituangkan dalam arah kebijakan pembangunan, mulai dari tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan, serta dapat

dijadikan kebijakan teknis oleh seluruh aparatur Kecamatan, serta masyarakat di Kecamatan Pasirjambu. Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 bisa dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya senergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 hingga 2029, yang mencakup kerangka Pendanaan Program / Kegiatan / Subkegiatan guna memastikan perencanaan yang selaras, terarah, dan sesuai regulasi.

Demikian, semoga Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Kecamatan Pasirjambu.

Soreang, September 2025
CAMAT PASIRJAMBU

Ttd

NIA KANIA

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 10
1.1 Latar Belakang 10
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 11
1.3 Maksud dan Tujuan 14
1.3.1 Maksud 14
1.3.2 Tujuan 14
1.4 Sistematika Penulisan 14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIRJAMBU 16
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pasirjambu 16
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Pasirjambu ... 16
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Pasirjambu..... 21
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Pasirjambu 28
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pasirjambu .. 56
2.1.5 Mitra Kecamatan Pasirjambu dalam Pemberian Pelayanan 57
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pasirjambu 57
2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029 57
2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 ... 59
2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 62
2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)..... 65
2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pasirjambu..... 67
2.2.6 Isu Strategis 69
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 72
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029..... 72
3.1.1 Tujuan 72
3.1.2 Sasaran..... 74

3.2 Strategi Kecamatan Pasirjambu dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 77
3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pasirjambu dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025-2029 82
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 83
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 83
4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 106
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD 106
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK..... 108
BAB V PENUTUP..... 109
5.1 Kesimpulan 109
5.2 Kaidah Pelaksanaan 110
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 111

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Pasirjambu Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin 22

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang 22

Tabel 2.3 Daftar Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pasirjambu Berdasarkan Jabatan, Pangkat / Golongan 22

Tabel 2.4 Daftar Tenaga Non ASN Kecamatan Pasirjambu 23

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pasirjambu Berdasarkan Golongan 23

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Pasirjambu yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon 24

Tabel 2.7 Data Hasil Rekonsiliasi Aset Periode 01 Januari s/d 30 Desember 2024 25

Tabel 2.8 Data Klasifikasi Aset Berdasarkan Kondisi 26

Tabel 2.9 Data Pelaksanaan Urusan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 .. 30

Tabel 2.10 Rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 31

Tabel 2.11 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021-2026 34

Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu 36

Tabel 2.13 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pasirjambu 46

Tabel 2.14 Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia 60

Tabel 2.15 Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan..... 60

Tabel 2.16 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah..... 60

Tabel 2.17 Tantangan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan 61

Tabel 2.18 Tantangan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum .. 61

Tabel 2.19 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung..... 65

Tabel 2.20 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pasirjambu 71

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasirjambu 76

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Pasirjambu 81

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Pasirjambu 85

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan 98

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 106

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasirjambu 107

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pasirjambu..... 108

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Struktur Kecamatan Pasirjambu 21
Gambar 2.2 Peta Jabatan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 24
Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Rasio Capaian Realisasi dan Anggaran ... 54
Gambar 2.4 Grafik Perkembangan Data Anggaran dan Realisasi 55
Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target 55
Gambar 2.6 Pohon Masalah Kecamatan Pasirjambu 67
Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Pasirjambu 75
Gambar 3.2 Kerangka Keterikatan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan Pasirjambu 75
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan / Subkegiatan Renstra Kecamatan Pasirjambu 83